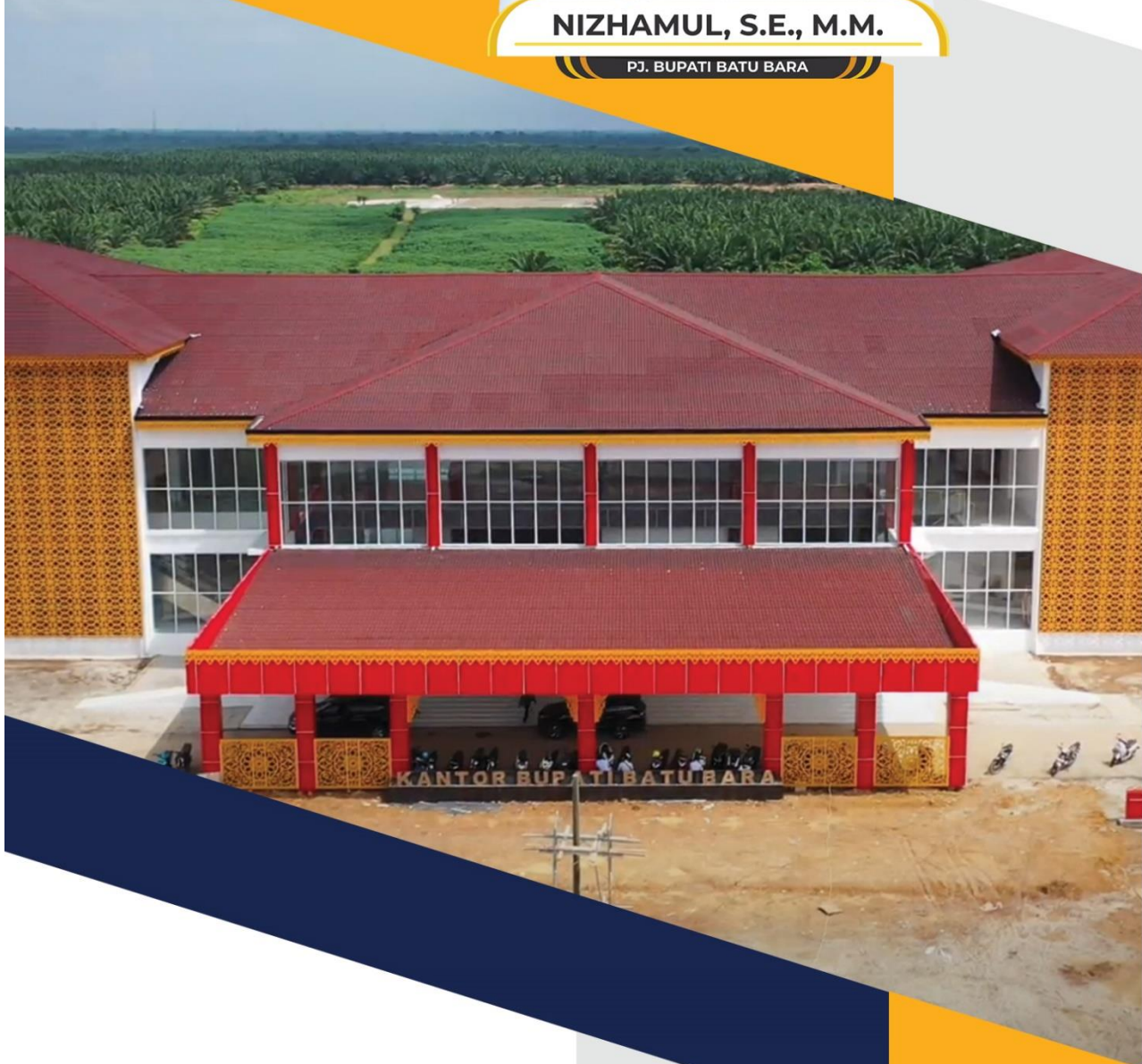




NIZHAMUL, S.E., M.M.

PJ. BUPATI BATU BARA



**LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
BATU BARA**

**TAHUN
2023**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KABUPATEN BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Lima Puluh, 27 Maret 2024
Inspektur Daerah Kabupaten Batu Bara



HASRUL IRFAN, S.Kom., M.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama Tahun 2023. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara yaitu: **“MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA MASYARAKAT INDUSTRI YANG SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERBUDAYA”** dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara tahun 2019 – 2023 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak terlepas dari upaya dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yang turut serta untuk memajukan Kabupaten Batu Bara, baik itu dari Masyarakat, Swasta dan Aparat Pemerintah beserta DPRD Kabupaten Batu Bara yang telah merumuskan kebijakan, melaksanakan serta pengawasan Program Pemerintah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

Lima Puluh, 28 Maret 2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

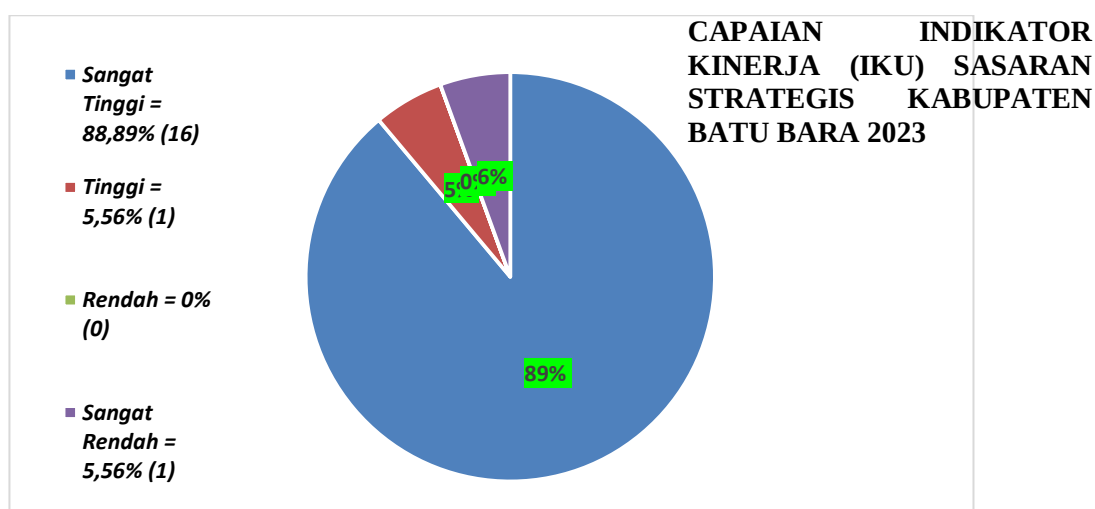
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Perlu untuk diingat, Laporan Kinerja tidak hanya sekadar alat akuntabilitas, akan tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap perangkat daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Batu Bara.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batu Bara tahun 2023 berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batubara Tahun 2019-2023 dan telah dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran dan 18 (delapan belas) indikator, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama sebagai berikut :



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama Bupati tahun 2023, disimpulkan bahwa 16 (delapan belas) indikator sasaran atau sebanyak 88,89% dalam kriteria Sangat Tinggi, bahkan 4 (empat) IKU diantaranya mencapai lebih dari 100%. Sedangkan 1 (dua) IKU atau 5,56% masuk dalam kriteria Tinggi, 1 (satu) IKU atau 5,56% masuk dalam kriteria Sangat Rendah dengan capaian 0 (nol) persen.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan berbagai unsur baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah.

Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Batu Bara untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
A.1. Sistematika Penyusunan	1
A.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
A.3. Maksud dan Tujuan	3
A.3. Struktur Organisasi	4
B. Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara	5
C. Perekonomian	6
C.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6
D. Ketenagakerjaan	10
E. Kesehatan	11
F. Indeks Pembangunan Manusia	11
F.1. Perbandingan IPM Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara	12
F.2. Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia Batu Bara Tahun 2022	13
G. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	13
H. ISU STRATEGIS	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
C. Anggaran Tahun 2023	33
BAB III Akuntabilitas Kinerja	34
A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2023	35
A.2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis	

Capaian Kinerja	38
B. Akuntabilitas Anggaran	114
BAB IV Penutup	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-203	7
Tabel 1.2	Distribusi PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023 ...	8
Tabel 1.3	Perbandingan IPM Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	12
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batu Bara Menurut Komponen Tahun 2019-2023	13
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah	23
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Bupati Batu Bara Tahun 2023	26
Tabel 2.3	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja 2023 Pemerintah Kabupaten Batu Bara	27
Tabel 2.4	Anggaran Belanja 2023	33
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja Dalam Skala Pengukuran Ordinal	35
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 3.3	Rincian sasaran dan indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Batu Bara 2023	38
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	39
Tabel 3.5	Predikat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara 2022	42
Tabel 3.6	Perkembangan nilai AKIP Kabupaten Batu Bara dari tahun 2018-2023	45
Tabel 3.7	Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan 2023	45
Tabel 3.8	Perbandingan Nilai Investasi Tahun 2022 dan Tahun 2023	55
Tabel 3.9	Data Perusahaan yang Melaporkan Nilai Investasi Tahun 2023 ...	56
Tabel 3.10	Kondisi jalan mantap Kabupaten Batu Bara periode 2018-2023 ...	65
Tabel 3.11	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	66
Tabel 3.12	Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Batu Bara dan Tingkat Kekumuhan	67
Tabel 3.13	Perbandingan Kawasan Kumuh setelah di verivikasi	69
Tabel 3.14	Persentase Angka Kemiskinan 2019-2023	74
Tabel 3.15	Perbandingan Luas lahan tanam dan luas panen dan rata-rata produksi masing-masing komoditi	81
Tabel 3.16	Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2022-2023	82

Tabel 3.17	Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dari Tahun 2019-2023 di Kabupaten Batu Bara	91
Tabel 3.18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2023	94
Tabel 3.19	Rincian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Batu Bara Tahun 2018-2022	95
Tabel 3.20	Jenis-jenis Inovasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	98
Tabel 3.21	Perbandingan IDM Tahun 2022 dan 2023 Kab. Batu Bara	108
Tabel 3.22	Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023	112

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2022	6
Grafik 1.2	Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023 (Atas Dasar Harga Berlaku).....	9
Grafik 1.3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Serta Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Periode 2019-2023 (Atas Dasar Harga Berlaku) ...	10
Grafik 1.4	Jumlah ASN Per Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan dan Usia 14	
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Batu Bara Tahun 2023	37
Grafik 3.2	Capaian Indikator Kinerja Per Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara Tahun 2023	42
Grafik 3.3	Persentase Kemiskinan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023..	75
Grafik 3.4	Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023	87
Grafik 3.5	Perkembangan Industri Kecil Dan Rumah Tangga Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2023	88
Grafik 3.6	Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Di Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023	95
Grafik 3.7	Angka Harapan Hidup Kabupaten Batu Bara Periode 2019-2023	100
Grafik 3.8	Pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Batu Bara periode 2018-2023	104
Grafik 3.9	Trend Indeks Gini Kabupaten Batu Bara Periode 2019-2023.....	111
Grafik 4.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Batu Bara	5
Gambar 2.1	Bagan Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batu Bara	20
Gambar 2.2	Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Tujuan Pada RPJMD	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja dan capaian kinerja.. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presdien Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran, selain menjadi media pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

A.1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan berdasarkan Dokumen Perencanaan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja, kemudian disampaikan informasi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

- 1) Lain-lain yang dianggap perlu

A.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan akuntabel;
2. Merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun 2023 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.

Tujuan:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara selama tahun anggaran 2023.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Batu

Bara Tahun 2023 dan sebagai bahan acuan perbaikan untuk tahun berikutnya.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya menerapkan asas transparan dan akuntabel.

A.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
 16. Dinas Perpustakaan;
 17. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

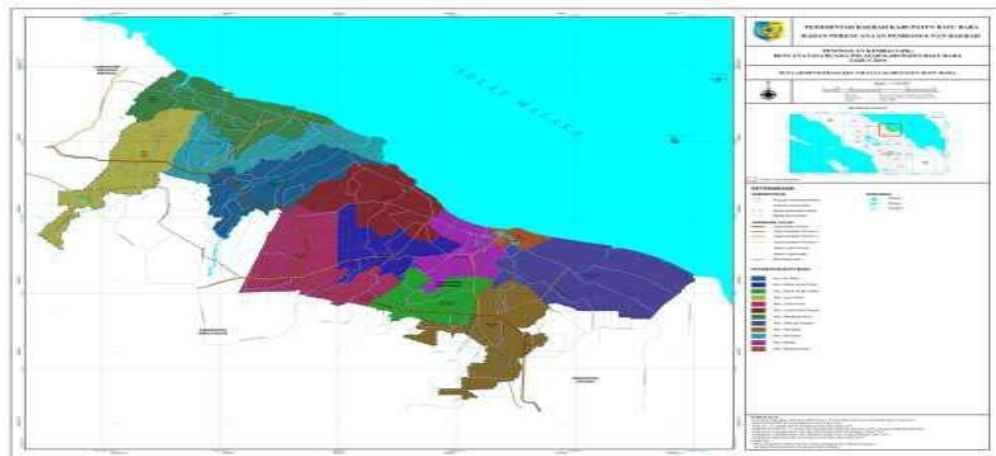
3. Badan Pendapatan Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara adalah 90.496 Ha yang terdiri dari 12 Kecamatan serta 151 Desa/Kelurahan definitif yang terdiri dari 141 desa dan 10 kelurahan, dengan rincian sebagaimana dikemukakan pada Tabel berikut:

Gambar 1.1.

Peta Kabupaten Batu Bara



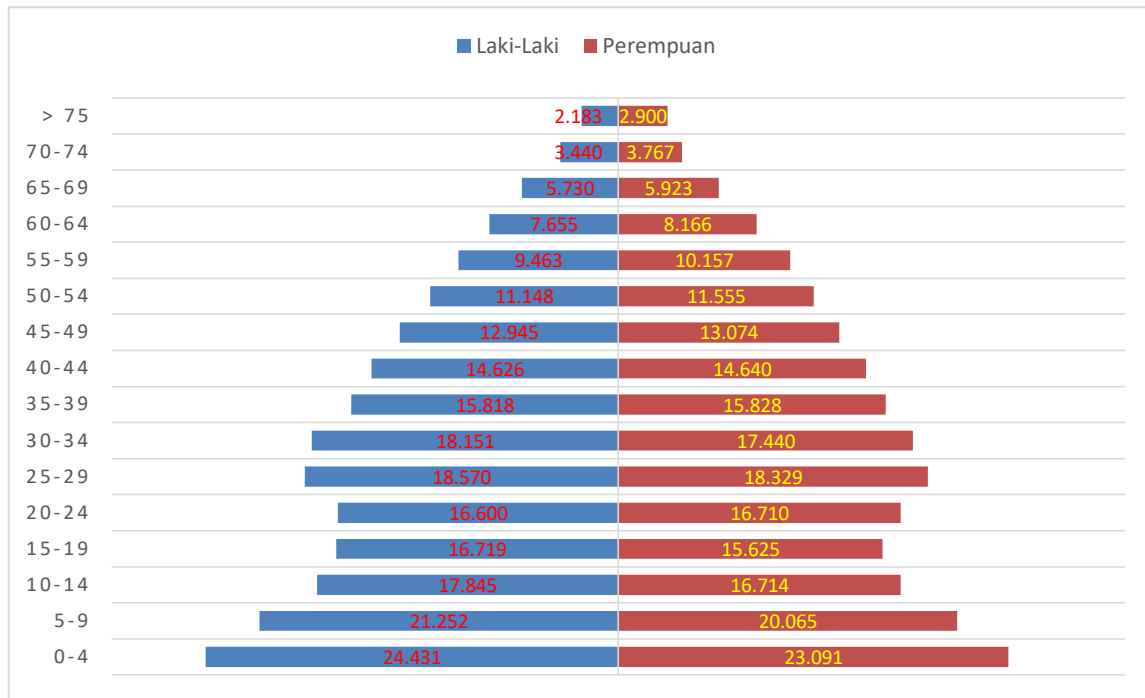
Secara geografis Kabupaten Batu Bara terletak antara 3°03' - 3°26' LU dan 99°01' - 100°00' BT. Secara Administrasi Kabupaten Batu Bara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Meranti (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Meranti Kabupaten Asahan dan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dan Tebing tinggi Kabupaten Serdang Bedagai.

Penduduk Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Batu Bara dalam angka 2024) sebanyak 430.533 jiwa yang terdiri atas 216.549 (50,30%) jiwa penduduk laki-laki dan 213.984 (49,70%) penduduk perempuan. Dengan kepadatan mencapai 484,9 jiwa/km² per rumah tangga 4 orang.

Grafik 1.1

Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2023



Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu usia 15-64 tahun sebanyak 283.219 jiwa. Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa usia kelompok produktif yang paling banyak di kisaran kelompok usia 25-29 tahun dengan jumlah sebanyak 36.899 jiwa. Perbandingan antara kelompok usia produktif dengan usia non produktif adalah 2:1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif sangat kecil.

C. PEREKONOMIAN

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, kebijakan perekonomian Kabupaten Batu Bara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada Peningkatan investasi, Peningkatan ekonomi daerah dan

menurunkan tingkat pengangguran

C.1. Produk Domesti Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikatakan PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, dengan kata lain menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1.1.

PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023

KBLI	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,	5216,09	5382,26	5640,46	5992,67	6182,03
B	Pertambangan dan pengalihan	34,37	34,27	34,46	36,05	37,37
C	Industri Pengolahan	11045,70	10841,09	10994,56	11.287,58	11,760,46
D	Pengadaan Listrik	14,87	15,69	16,22	16,79	17,24

	dan Gas					
E	Pengadaan Air: Pengelolaan Sampah, limbah, daur ulang	7,06	7,04	7,20	7,23	7,38
F	Konstruksi	1575,92	1506,39	1507,12	1520,68	1563,74
G	Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor	3859,00	3917,03	4058,01	4322,78	4578,69
H	Transportasi dan pergudangan	831,18	804,22	799,63	831,34	845,79
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	383,55	267,24	267,17	278,89	299,67
J	Informasi dan komunikasi	148,07	159,13	170,33	178,09	188,91
K	Jasa keuangan dan asuransi	69,79	70,06	72,09	75,02	79,72
L	Real estate	268,76	273,23	273,99	281,01	289,1
M, N	Jasa perusahaan	21,45	21,52	21,45	22,24	23,32
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	422,82	421,47	419,47	419,13	424,98
P	Jasa Pendidikan	108,59	112,15	113,28	116,7	120,71
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan	70,35	69,93	69,22	73,05	77,81
R, S, T, U	Jasa Lainnya	21,01	20,93	21,37	22,96	25,70
	PDRB	23998,59	23923,64	24486,06	25482,21	26.522,68

Sumber Data BPS: BARADA 2024

Tabel.1.2.

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

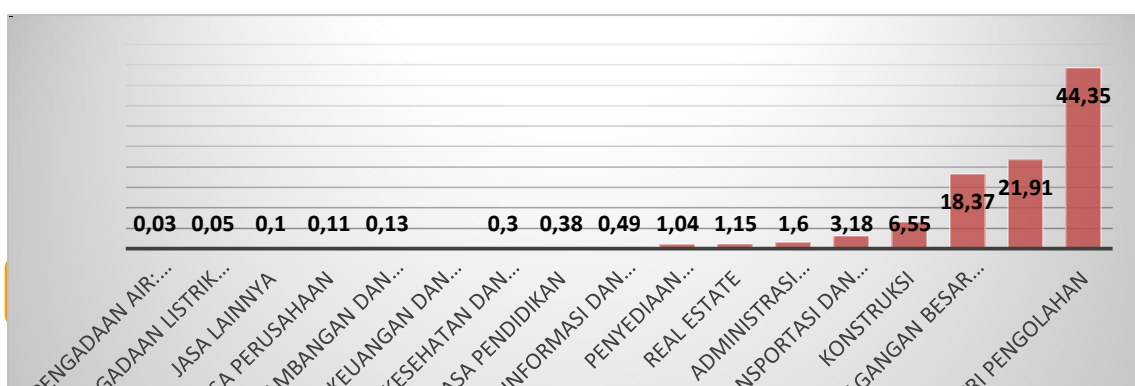
KBLI	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,	18,78	19,51	20,25	21,08	21,91
B	Pertambangan dan pengalihan	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
C	Industri Pengolahan	46,36	45,62	45,72	45,55	44,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air: Pengelolaan Sampah, limbah, daur ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	7,43	7,14	6,85	6,64	6,55
G	Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda	17,48	17,96	17,89	17,82	18,37

	motor					
H	Transportasi dan pergudangan	3,53	3,39	3,21	3,17	3,18
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,23	1,13	1,06	1,02	1,04
J	Informasi dan komunikasi	0,46	0,49	0,50	0,49	0,49
K	Jasa keuangan dan asuransi	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28
L	Real estate	1,29	1,32	1,25	1,19	1,15
M,N	Jasa perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	1,96	1,96	1,84	1,67	1,60
P	Jasa Pendidikan	0,43	0,44	0,42	0,39	0,38
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan	0,31	0,32	0,30	0,29	0,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data BPS: BARADA 2024

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2019-2023), struktur perekonomian Kabupaten Batu Bara didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran. Ketiga kategori tersebut memiliki peranan sebesar 84,63% terhadap total PDRB Kabupaten Batu Bara tahun 2023. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 dihasilkan oleh industri pengolahan yaitu mencapai 44,35 %. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian-kehutanan dan perikanan sebesar 21,91 % dan lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,37 %. Grafik 1.2 menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kabupaten Batu Bara tahun 2023 yang diurut dari nilai kontribusi terbesar hingga nilai kontribusi terkecil dengan menggunakan harga berlaku, sebagai berikut:

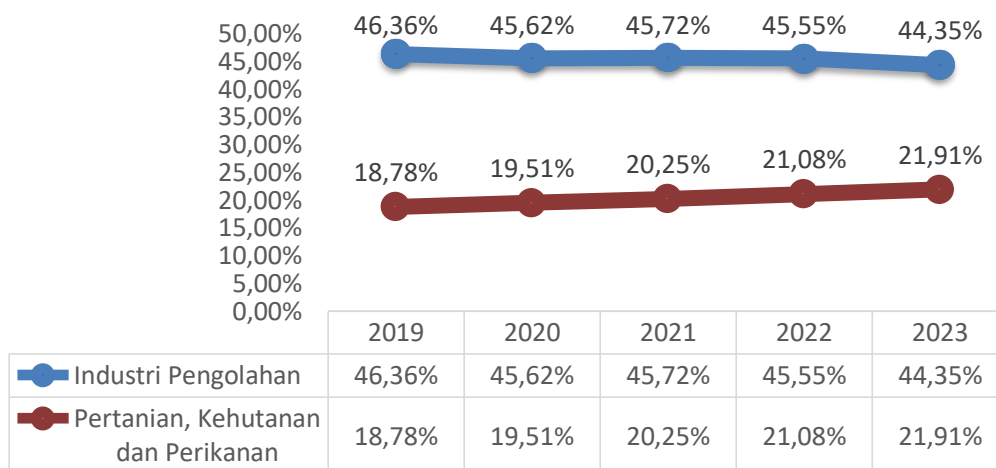
Grafik 1.2.
Persentase PDRB Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023 (Atas Dasar Harga Berlaku)



Menyimak data diatas, pada tahun 2023, sektor industri pengolahan masih merupakan sektor tertinggi yang memberikan peranan terhadap total PDRB Kabupaten Batu Bara.

Berikut ini grafik lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi bagi PDRB Kabupaten Batu Bara dari tahun 2019-2023:

Grafik 1.3.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Serta Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Periode 2019-2023 (Atas Dasar Harga Berlaku)



Sumber: BPS Kabupaten Batu Bara; BARADA 2024

D. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, pada tahun 2023 angkatan kerja di Batu Bara sebagian besar berpendidikan SMA dengan persentase mencapai 36,57, kemudian berpendidikan SD, tidak/belum tamat SD dan tidak/belum pernah sekolah sebesar 33,46, angkatan kerja yang berpendidikan SMP dan perguruan tinggi masing-masing sekitar 21,67 dan 8,28%. Jika dilihat dari status pekerjaannya lebih dari sepertiga (39,75 %) penduduk yang bekerja adalah buruh/karyawan. Penduduk yang penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar mencapai 14,38% sedangkan

berusaha sendiri sebesar 22,21 %. Penduduk sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dan pekerja bebas masing-masing sebesar 8,13% dan 11,58%, sedangkan sisanya (3,84%) adalah pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap/dibayar.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Batu Bara pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2023 sebesar 707 pekerja. Perbandingan pencari kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, pada tahun 2023 terdapat 100 laki-laki dan 607 perempuan pencari kerja terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan. Sementara itu menurut lokasinya, Kecamatan Sei Suka merupakan kecamatan yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak di tahun 2023 yaitu sebesar 106 usaha dengan jumlah tenaga kerja terdaftar sebesar 7.637 pekerja.

E. KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Batu Bara terdapat Empat unit rumah sakit, puskesmas yang ada berjumlah 15 unit, puskesmas pembantu sebanyak 61 unit, posyandu sebanyak 529 unit, Poliklinik sebanyak 28 unit serta polindes sebanyak 34 unit.

Tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Batu Bara baik negeri maupun swasta terdiri dari 128 orang dokter umum, 70 orang dokter spesialis, 41 orang dokter gigi. Sementara itu tenaga medis pemerintah lainnya seperti bidan ada 716 orang, tenaga kefarmasian ada 63 orang, tenaga kesehatan masyarakat 64 orang, tenaga kesehatan lingkungan ada 15 orang, tenaga gizi 25 orang dan ahli laboratorium medi ada 2 orang.

Di Kabupaten Batu Bara, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2023 jumlah PUS bertambah menjadi 59.374 pasangan dari 59.063 pasangan pada tahun 2022.

F. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indek Pembangunan manusia di Batu Bara terus mengalami kemajuan. Pada Tahun 2023 IPM Batu Bara mencapai 72,56 atau meningkat 3,05 poin jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 69,51. Peningkatan IPM tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan

maupun hidup layak. Berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023, IPM tertinggi di Sumatera Utara adalah Kota Medan sebesar 82,61 diikuti Kota Pematangsiantar sebesar 80,46 pada posisi kedua, dan Kota Tebing Tinggi sebesar 78,17 pada posisi ketiga.

Anak-anak yang pada tahun 2023 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,11 tahun, lebih lama 0,18 tahun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 12,92 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,5 tahun, lebih lama 0,24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, masyarakat Batu Bara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10.933 juta pertahun. Angka ini lebih tinggi sebesar 178 ribu jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan pengeluaran rata-rata perkapita sebesar 10.755 juta rupiah per tahun.

F.1. Perbandingan IPM Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara

IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara, maupun dengan kabupaten/ kota secara nasional.

Dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Utara, Kota Medan memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi sebesar 82,61. Nias Barat merupakan kabupaten/kota yang memiliki IPM terendah sebesar 65,12. Berikut tabel Perbandingan IPM se Provinsi Sumatera Utara tahun 2023:

Tabel 1.3.
Perbandingan IPM Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No	Kab	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita	IPM
1.	Nias	71,74	13,30	6,14	7.301	65,15
2.	Mandailing Natal	71,72	13,86	8,84	10.251	72,65
3.	Tapanuli Selatan	71,61	13,58	9,51	11.829	74,58
4.	Tapanuli Tengah	71,76	13,49	8,87	10.690	72,77
5.	Tapanuli Utara	74,10	13,73	10,09	12.115	76,86
6.	Toba	74,22	13,59	10,59	12.676	77,83
7.	Labuhan Batu	72,88	13,25	9,49	11.670	74,70

8.	Asahan	73,39	12,64	8,83	11.795	73,59
9.	Simalungun	74,08	12,82	9,72	11.746	75,17
10.	Dairi	74,13	13,32	9,88	10,969	75,18
11.	Karo	74,16	13,25	10,03	12.779	76,88
12.	Deli Serdang	73,65	13,39	10,28	12.890	77,16
13.	Langkat	74,14	13,27	8,73	11.632	74,33
14.	Nias Selatan	71,61	12,78	6,48	7.299	64,96
15.	Humbang Hasundutan	74,07	13,32	10,01	8.476	72,49
16.	Pakpak Bharat	72,61	13,90	9,61	8.764	72,30
17.	Samosir	74,10	13,51	9,47	9.158	72,93
18.	Serdang Bedagai	73,11	12,64	8,85	11.695	73,40
19.	Batu Bara	72,63	13,11	8,50	10.933	72,56
20.	Padang Lawas Utara	71,57	13,53	9,55	10.615	73,45
21.	Padang Lawas	71,52	13,70	9,43	9.395	72,16
22.	Labuhan Batu Selatan	72,46	13,42	8,93	11.950	74,23
23.	Labuhan Batu Utara	74,06	13,57	8,87	12.429	75,45
24.	Nias Utara	72,12	13,36	6,85	6.788	65,44
25.	Nias Barat	72,30	12,98	7,07	6.382	64,68
26.	Sibolga	74,02	13,42	10,44	12.285	77,07
27.	Tanjung Balai	74,01	13,14	9,68	11.753	75,42
28.	Pematang Siantar	74,75	14,60	11,58	12.984	80,46
29.	Tebing Tinggi	74,07	13,12	10,86	13.385	78,17
30.	Medan	74,76	14,78	11,62	15.674	82,61
31.	Binjai	74,18	14,17	11,19	11.567	78,11
32.	Padang Sidempuan	73,54	14,59	11,12	11.552	78,10
33.	Gunung Sitoli	74,03	13,78	8,65	8.635	71,55

F.2. Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia Batu Bara Tahun 2023

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.4.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batu Bara Menurut Komponen,
Tahun 2019-2023

Komponen	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup	Tahun	66,75	66,96	67,13	67,55	72,63
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,63	12,64	12,63	13,11
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,02	8,06	8,07	8,26	8,50
Pengeluaran Perkapita	Rp.000	10575	10410	10539	10755	10.933
IPM		68,35	68,36	68,58	69,51	72,56
Pertumbuhan IPM	%	1,00	0,01	0,22	0,93	3,05

G. S
UM
BE
R

DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH

Sumber Data: BPS Kabupaten Batu Bara

Pemerintah Kabupaten Batu Bara di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan pemilihan umum kepala daerah. Dalam melaksanakan

tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta jajaran dibawahnya.

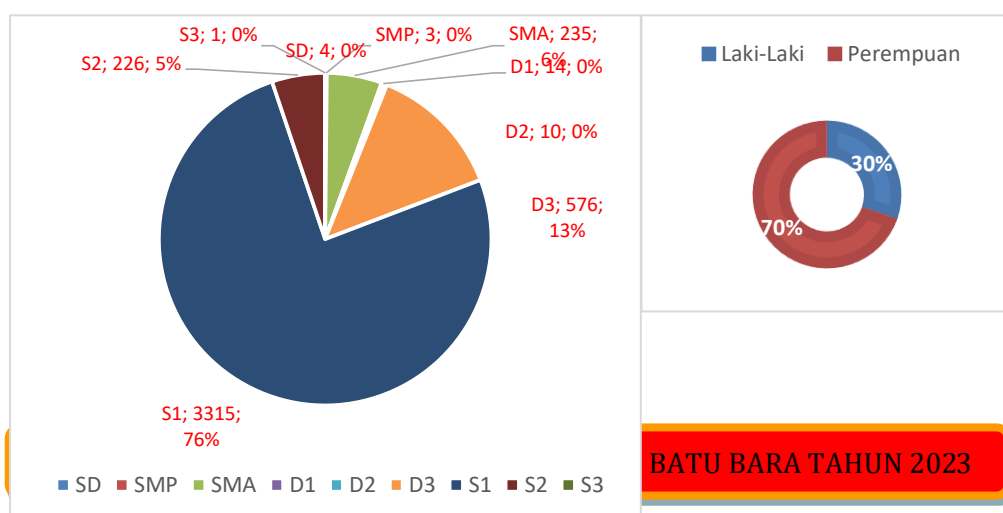
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah, Yakni:

- a. Sekretariat Daerah dengan 9 Bagian
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas (16 dinas)
- e. Badan (7 Badan)
- f. Kecamatan (12 Kecamatan)
- g. Kelurahan (10 Kelurahan)

Kondisi tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki sumber daya aparatur pemerintah sebanyak 3.684 orang ASN dan 700 Orang ASN PPPK, yang terdiri dari 1.186 orang ASN laki-laki (32,19%) dan 2.498 orang ASN perempuan (67,81%), dan 144 orang ASN PPPK laki-laki (20,57%), serta 556 orang ASN PPPK perempuan (79,43%). Apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara didominasi oleh jenjang pendidikan S1 3.315 Orang, diikuti jenjang pendidikan D3 576 orang, SMA 235 orang, S2 226, sisanya sebanyak 31 orang mengenyam pendidikan SD, SMP, D1,D2 dan S3.

Grafik 1.4

Jumlah ASN Per Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan dan Usia



H. ISU STRATEGI

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur;
3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat, Peningkatan Penerimaan Daerah, Daya Saing, Kesempatan Kerja dan Berusaha;
4. Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja ASN, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

RPJMD Kabupaten Batu Bara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batubara Tahun 2019-2023 dan telah dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Perubahan RPJMD Kabupaten Batu Bara juga dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan dokumen perencanaan baik diprovinsi maupun di tingkat nasional, seperti Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Penyusunan Perubahan RPJMD ditingkat Provinsi Sumatera Utara.

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara 2019-2023 merupakan kondisi yang dicita-citakan dan ingin dicapai Kabupaten Batu Bara pada masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih. Berdasarkan latar belakang, potensi sumber daya, dan permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Batu Bara maka ditetapkan visi sebagai berikut:

**MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA
MASYARAKAT INDUSTRI YANG SEJAHTERA, MANDIRI,
DAN BERBUDAYA.**

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Industri	Masyarakat Industri adalah masyarakat yang terbuka untuk menerima berbagai pengalaman yang baru, menghargai setiap perencanaan untuk kemajuan, dan senantiasa ingin berkembang/maju.
2. Sejahtera	Masyarakat Kabupaten Batu Bara terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui pengembangan usaha yang maju dan berkelanjutan.
3. Mandiri	Kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan infrastruktur strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi demi kemajuan individu.
4. Berbudaya	Bertindak dan bermasyarakat berpedoman pada nilai-nilai budaya dan tradisi sehingga tercipta masyarakat Kabupaten Batu Bara yang berahlak mulia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk

mencapai visi.

Misi Kabupaten Batu Bara yang disusun untuk memperjelas langkah dalam perwujudan visi kabupaten Batu Bara, adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi.

Membentuk aparatur pemerintah yang profesional dan melayani dengan hati sehingga urusan keperluan masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat serta membuka peluang investasi.

Misi 2: Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dalam menunjang pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat yang berbasis pada potensi daerah dan bersifat terintegrasi dan berkesinambungan.

Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya

Menyiapkan SDM yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, inovatif dan mengadopsi nilai-nilai budaya yang baik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah (*added value*) guna mewujudkan daya saing daerah.

Misi 4: Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batubara

Menggalang dan mengembangkan industri berbasis potensi unggulan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan bidang lainnya yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan bersifat berkelanjutan.

Misi 5: Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang

Membangun dan mengembangkan pola pemasaran yang memanfaatkan teknologi informasi yang dapat memperluas jaringan pemasaran untuk produk-produk industri, pertanian, dan perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat.

Misi 6: Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batubara.

Meningkatkan kerjasama pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan *stakeholders* dalam membangun Kabupaten Batu Bara secara kolaboratif dan partisipatif dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 7: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat.

Mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dengan tepat dan metoda yang maju demi terwujudnya sumber daya manusia yang terampil, sehat, mandiri, berkarakter dan inovatif serta memiliki motivasi yang tinggi untuk maju.

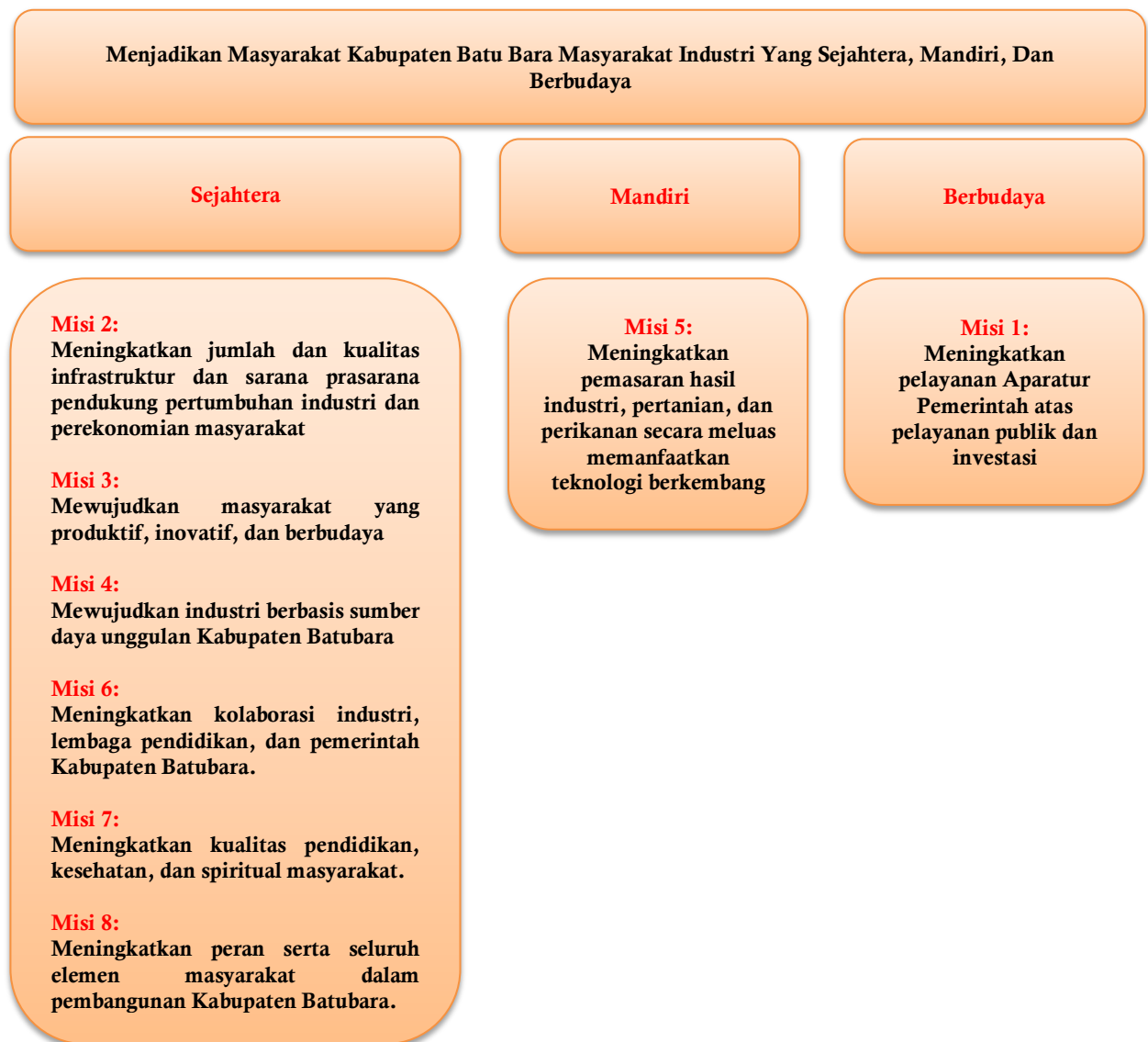
Misi 8: Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batubara.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Batu Bara yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan rasa kepemilikan atas hasil pembangunan serta pembangunan yang tepat sasaran.

Penjabaran pelaksanaan Ke-8 (delapan) misi di atas, semuanya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023, yang merupakan cerminan tentang urgensi permasalahan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama, pendukung/manajerial. Namun, sebelum menyusun proses bisnis, terlebih dahulu diidentifikasi keterkaitan visi dan misi yang digambarkan dalam bagan berikut ini:

Gambar 2.1
Bagan Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batu Bara

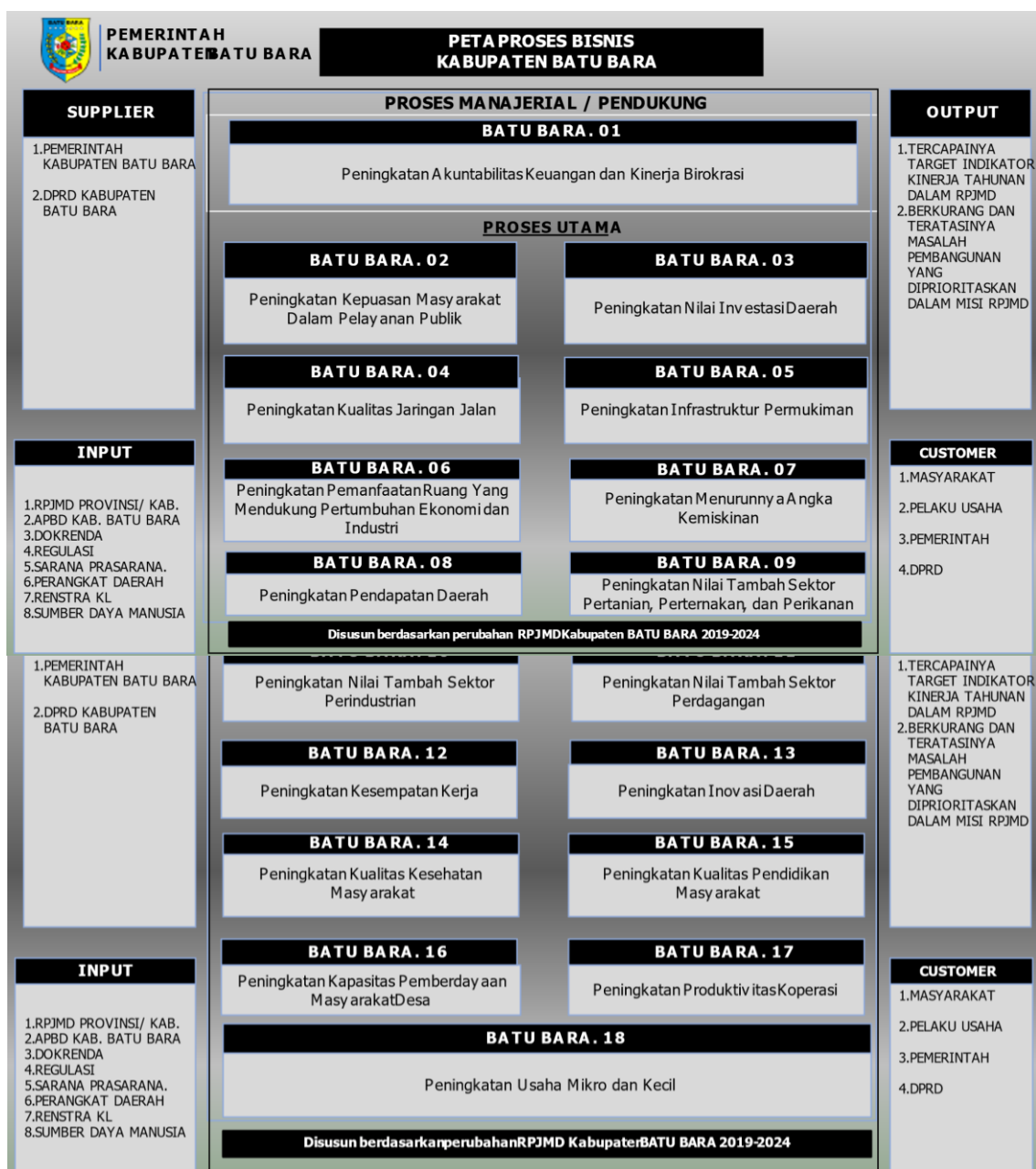


Gambar diatas merupakan bagan rekontruksi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan proses bisnis perubahan RPJMD. Proses bisnis perubahan RPJMD dibagi menjadi 2 bagian Proses Bisnis, yaitu, Proses Manajerial/Pendukung dan Proses Utama.

Berdasarkan formulasi sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1 Perubahan RPJMD Kabupaten Batu Bara 2019-2023 serta memedomani kerangka pikir logis dan unsur Peta Proses Bisnis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, maka dapat dihasilkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

Gambar 2.2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Tujuan Pada RPJMD



Proses pendukung dalam mencapai Visi RPJMD adalah Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi. Sedangkan proses Utama meliputi Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Investasi Daerah, Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan, Peningkatan Infrastruktur Permukiman, Pemanfaatan Tata Ruang, Menurunkan Kemiskinan, Peningkatan Pendapatan Daerah, Peningkatan Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Peningkatan Sektor Perindustrian, Peningkatan Sektor Perdagangan, Kesempatan Kerja, Inovasi Daerah, Kualitas Kesehatan, Kualitas Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Produktivitas Koperasi dan Peningkatan Usaha Mikro. Proses bisnis tersebut selanjutnya *breakdown* menjadi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Sasaran ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja kepala daerah dimana setiap tahun akan dievaluasi pencapaiannya.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kemudian dirumuskan IKU. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada Perubahan RPJMD Kabupaten Batu Bara, setelah beberapa kali evaluasi dengan bimbingan langsung dari Pihak Kemenpan RB, kembali mengalami perubahan tujuan, sasaran dan Indikator. Perubahan IKU ini telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Perubahan Indikator Kinerja Utama ini, berpengaruh pada proses bisnis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 477/Organisasi/2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batu Bara, disebabkan karena terdapat sasaran yang dihapus atau pun dirubah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara memprioritaskan sebanyak 9 (sembilan) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran dan 18 (delapan belas) indikator. Rincian hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah

VI si	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Sumber Data
1	Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah Atas Pelayanan Publik Dan Investasi.	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Kab. Batu Bara	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	Opini Pemeriksaan BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
				Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kementerian PAN dan RB RI
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Kementerian PAN dan RB RI
		Terwujudnya peningkatan investasi	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA)	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
2	Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.	Terciptanya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pertumbuhan Industri dan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	(Panjang Jalan Mantap / Total Panjang Panjang) x 100%)	Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang
			Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Terkendalinya Penataan Ruang dan Penciptaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Industri	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Luas kawasan yang diberi izin/Luas kawasan industri yang diberikan sesuai dengan peruntukan x100%	- Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu pintu. - Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

3	Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya.	Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Daerah	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	(Jumlah Penduduk Miskin/Jumlah Penduduk) x 100%	Badan Pusat Statistik
			Meningkatnya Pendapatan Daerah	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan	(Jumlah PAD/Jumlah Pendapatan) x 100%	Badan Pusat Statistik
			Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan/Jumlah PDRB) x 100%	Badan Pusat Statistik
4	Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara		Meningkatnya Nilai Sektor Perindustrian	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri Pengolahan/Jumlah PDRB) x 100%	Badan Pusat Statistik
			Meningkatnya Nilai Sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB	(Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor /Jumlah PDRB) x 100%	Badan Pusat Statistik
5	Meningkatnya pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan Teknologi Berkembang	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Badan Pusat Statistik
6	Meningkatkan Kolaborasi Industri, Lembaga Pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
7	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Spiritual Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Badan Pusat Statistik

			Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Sekolah Lama	(Jumlah Lulusan/Jumlah Siswa pada jenjang tertinggi tahun sebelumnya) x 100%	Badan Pusat Statistik
8	Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara	Terwujudnya pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Membangun Desa	Jumlah IDM seluruh desa/Jumlah desa Ket: $IDM = \frac{1}{3} (IKS + IKE + IKL)$ IKS = Indeks Ketahanan Sosial IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
			Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	Indeks Gini	Badan Pusat Statistik

Sumber: Peraturan Bupati No. 109 Tahun 2022

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah ditetapkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Batu Bara dengan Nomor 050.13/7018. Adapun perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2.

Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Batu Bara Tahun 2023

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satua	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86
3	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	52,5 Triliun
4	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	80
5	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	Ha	5,50
6	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persen	- 100
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Persen	11,28
8	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan	Persen	16,00
9	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	25,00

10	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	46,00
11	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB	Persen	19,96
12	Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	75,00
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45 (Inovatif)
14	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,71
15	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,60
16	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7073
17	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	Indeks	0,240

Program dan anggaran perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja 2023
Pemerintah Kabupaten Batu Bara

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.901.748.601	PAPBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	115.262.876.103	PAPBD
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000	PAPBD
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79.713.494.226	PAPBD
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.137.489.150	PAPBD
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	421.500.000	PAPBD
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.204.763.224	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.736.611.539	PAPBD
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.515.475.508	PAPBD
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.372.359.000	PAPBD
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.291.215.334	PAPBD
12	Program Pengembangan Permukiman	11.219.433.900	PAPBD
13	Program Penataan Bangunan Gedung	87.201.380.345	PAPBD
14	Program Penyelenggaraan Jalan	108.820.162.956	PAPBD
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	276.142.839	PAPBD
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	281.219.050	PAPBD
17	Program Pengembangan Perumahan	115.995.262	PAPBD
18	Program Kawasan Permukiman	1.891.600.000	PAPBD
19	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.353.097.377	PAPBD
20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	500.000.000	PAPBD
21	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	214.180.000	PAPBD
22	Program Penanggulangan Bencana	374.238.346	PAPBD
23	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.961.925.695	PAPBD
24	Program Pemberdayaan Sosial	244.000.000	PAPBD
25	Program Rehabilitasi Sosial	3.769.129.973	PAPBD
26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.721.384.062	PAPBD
27	Program Penanganan Bencana	446.696.600	PAPBD
28	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.586.030.099	PAPBD
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	132.350.000	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
30	Program Hubungan Industrial	101.650.000	PAPBD
31	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	269.012.250	PAPBD
32	Program Perlindungan Perempuan	12.250.000	PAPBD
33	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	133.466.000	PAPBD
34	Program Perlindungan Khusus Anak	38.150.000	PAPBD
35	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	56.000.000	PAPBD
36	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	450.059.650	PAPBD
37	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	39.950.000	PAPBD
38	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.541.644.409	PAPBD
39	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	116.196.024	PAPBD
40	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	69.996.053	PAPBD
41	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	165.141.970	PAPBD
42	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	29.850.000	PAPBD
43	Program Pengelolaan Persampahan	10.909.437.816	PAPBD
44	Program Pendaftaran Penduduk	698.000.000	PAPBD
45	Program Pencatatan Sipil	0	PAPBD
46	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	57.730.000	PAPBD
47	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	33.000.000	PAPBD
48	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	35.400.000	PAPBD
49	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.931.797.074	PAPBD
50	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.794.377.813	PAPBD
51	Program Pengendalian Penduduk	124.200.000	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
52	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.492.347.000	PAPBD
53	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.889.650.000	PAPBD
54	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.275.110.908	PAPBD
55	Program Pengelolaan Pelayaran	175.505.000	PAPBD
56	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.429.499.750	PAPBD
57	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	717.726.984	PAPBD
58	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	39.974.224	PAPBD
59	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	41.613.780	PAPBD
60	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	427.170.000	PAPBD
61	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	76.232.020	PAPBD
62	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	198.000.000	PAPBD
63	Program Pengembangan UMKM	3.056.284.560	PAPBD
64	Program Promosi Penanaman Modal	306.897.472	PAPBD
65	Program Pelayanan Penanaman Modal	55.800.000	PAPBD
66	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	480.000.000	PAPBD
67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.183.504.113	PAPBD
68	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.954.714.120	PAPBD
69	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	178.957.500	PAPBD
70	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	85.011.200	PAPBD
71	Program Pengembangan Kebudayaan	1.135.738.490	PAPBD
72	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	84.000.000	PAPBD
73	Program Pembinaan Perpustakaan	466.090.688	PAPBD
74	Program Pengelolaan Arsip	73.072.597	PAPBD
75	Program Perlindungan dan	13.637.405	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Penyelamatan Arsip		
76	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	904.788.000	PAPBD
77	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	452.326.262	PAPBD
78	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	21.650.000	PAPBD
79	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	88.900.000	PAPBD
80	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	396.000.000	PAPBD
81	Program Pemasaran Pariwisata	169.977.310	PAPBD
82	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.505.429.040	PAPBD
83	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.491.248.000	PAPBD
84	Program Perizinan Usaha Pertanian	158.845.000	PAPBD
85	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	714.712.585	PAPBD
86	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	123.200.000	PAPBD
87	Program Penyuluhan Pertanian	909.234.644	PAPBD
88	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	60.182.675	PAPBD
89	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	618.000.000	PAPBD
90	Program Pengembangan Ekspor	357.000.000	PAPBD
91	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	126.800.000	PAPBD
92	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	411.400.000	PAPBD
93	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.671.603.938	PAPBD
94	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.079.829.611	PAPBD
95	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.902.967.519	PAPBD
96	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.135.364.373	PAPBD
97	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	598.149.676	PAPBD
98	Program Pengelolaan Keuangan	213.296.868.251	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Daerah		
99	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.731.275.000	PAPBD
100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.283.331.522	PAPBD
101	Program Kepegawaian Daerah	1.120.818.182	PAPBD
102	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	766.920.000	PAPBD
103	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	818.599.395	PAPBD
104	Program Penyelenggaraan Pengawasan	989.370.000	PAPBD
105	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	587.426.000	PAPBD
106	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	228.973.569	PAPBD
107	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.053.472.224	PAPBD
108	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	255.110.280	PAPBD
109	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.128.504.560	PAPBD
110	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.730.174	PAPBD
111	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.407.709.847	PAPBD
112	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.274.535.000	PAPBD
113	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	439.066.900	PAPBD
114	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	479.531.140	PAPBD
115	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.482.135.600	PAPBD
TOTAL		1.433.709.332.336	

C. ANGGARAN TAHUN 2023

Selama tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk meraih target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara dengan total anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 911.558.891.003,00 atau 63,58% dari total anggaran Rp. 1.433.709.332.336,00.

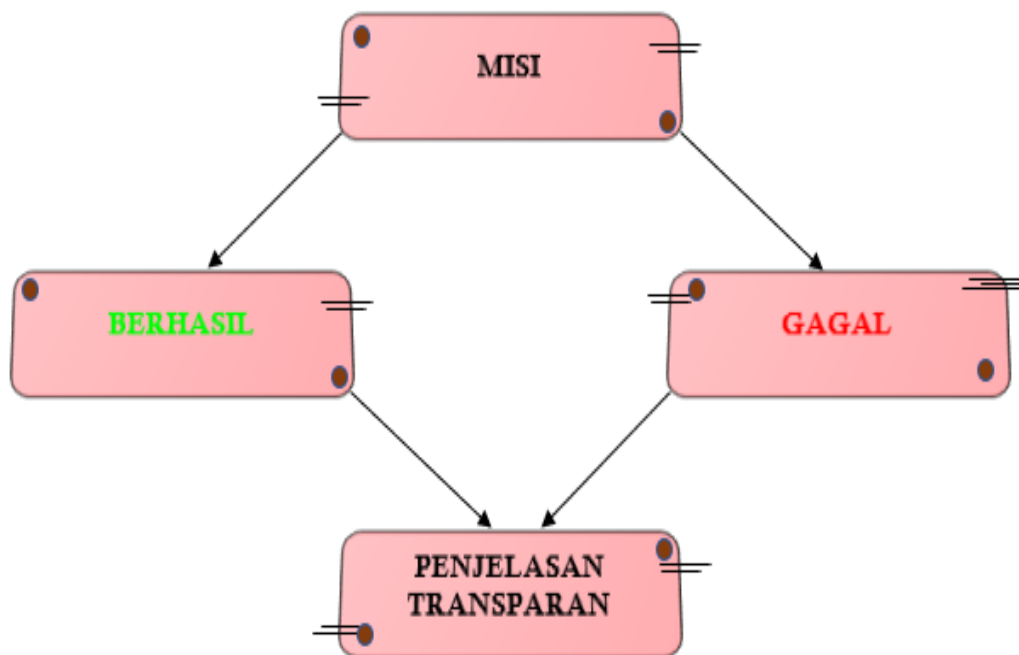
Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, komposisi belanja APBD Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Anggaran Belanja 2023

No	Uraian	Rencana Belanja (Rp)	Persentase
1	Belanja Operasi	911.558.891.003,00	63,58
2	Belanja Modal	314.720.982.133,00	21,95
3	Belanja Tidak Terduga	2.167.800.000,00	0,15
4	Belanja Transfer	205.261.659.200,00	14,32
	Jumlah	1.433.709.332.366,00	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Pemerintah Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi Laporan harus memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, RKT Tahun 2015, RKPD Tahun 2015, dan PK Tahun 2022. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dalam Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100	Tidak tercapai	
= 100	Tercapai sesuai target	
> 100	Melebihi target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01$	Sangat Tinggi
2	75,01 - 90	Tinggi
3	65,01 - 75	Sedang
4	50,01 - 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

Secara umum Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Batu Bara dengan Nomor 050.13/7018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Penghitungan persentase capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$= \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$= \frac{\textit{Target} - (\textit{Realisasi} - \textit{Target})}{\textit{Target}} 100\%$$

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, hal utama yaitu memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

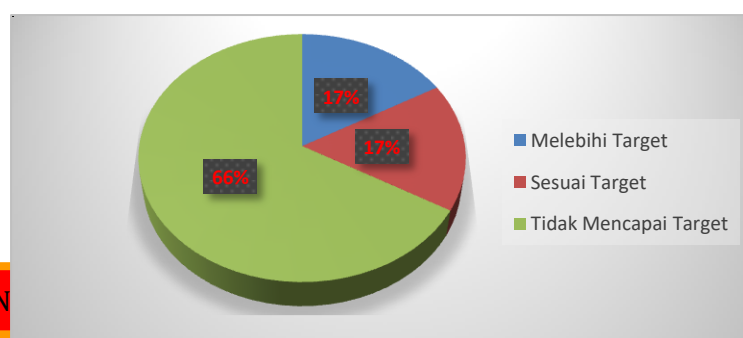
Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Opini BPK, Pencapaian 100%;
2. Nilai Evaluasi AKIP, pencapaian 100%;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat, pencapaian 99,42%;
4. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), Pencapaian 99,87%;
5. Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap, pencapaian

- 101,3%;
6. Jumlah kawasan kumuh yang tertangani, pencapaian 0%;
 7. Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri, pencapaian 100%;
 8. Persentase Kemiskinan, pencapaian 99,11%;
 9. Proporsi PAD Terhadap Pendapatan, pencapaian 74,06%;
 10. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB, pencapaian 87,64%;
 11. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB, pencapaian 96,41%;
 12. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB, pencapaian 92,03%;
 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, pencapaian 97,25%;
 14. Indeks Inovasi Daerah, pencapaian 118,15%
 15. Angka harapan hidup, pencapaian 104,19%;
 16. Rata-Rata Lama sekolah, pencapaian 98,84%;
 17. Indeks desa membangun, pencapaian 98,52%;
 18. Indeks Gini, pencapaian 93,75%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 (delapan belas) indikator kinerja utama Bupati Batu Bara Tahun 2023. Disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau sebanyak 83,32 % dalam kategori **Sangat tinggi**, sedangkan 1 (satu) IKU sebanyak 5,56% masuk dalam kriteria **tinggi**, kemudian 1 (satu) IKU atau sebanyak 5,56% masuk dalam kriteria **Sedang**, dan 1 (satu) indikator atau 5,56% masuk dalam kriteria **sangat rendah** dengan pencapaian 0% yaitu pada indikator Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023



A.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja pemerintah Kabupaten Batu Bara selalu berupaya untuk dioptimalkan Sesuai dengan perkembangan, dinamika dan tuntutan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan derajat pelayanan. Oleh karena itu, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu diarahkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dengan merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berupaya memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2019-2023. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Batu Bara Tahun 2023, telah ditetapkan 17 (tujuh belas) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.

**Rincian sasaran dan indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
Bupati Batu Bara 2023**

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	2 Indikator
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	1 Indikator
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	1 Indikator
4	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1 Indikator
5	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	1 Indikator

6	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	1 Indikator
7	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	1 Indikator
8	Menurunnya Angka Kemiskinan	1 Indikator
9	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Indikator
10	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	1 Indikator
11	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Indikator
12	Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja	1 Indikator
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	1 Indikator
14	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Indikator
15	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1 Indikator
16	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Indikator
17	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	1 Indikator

Secara umum Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Batu Bara nomor 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

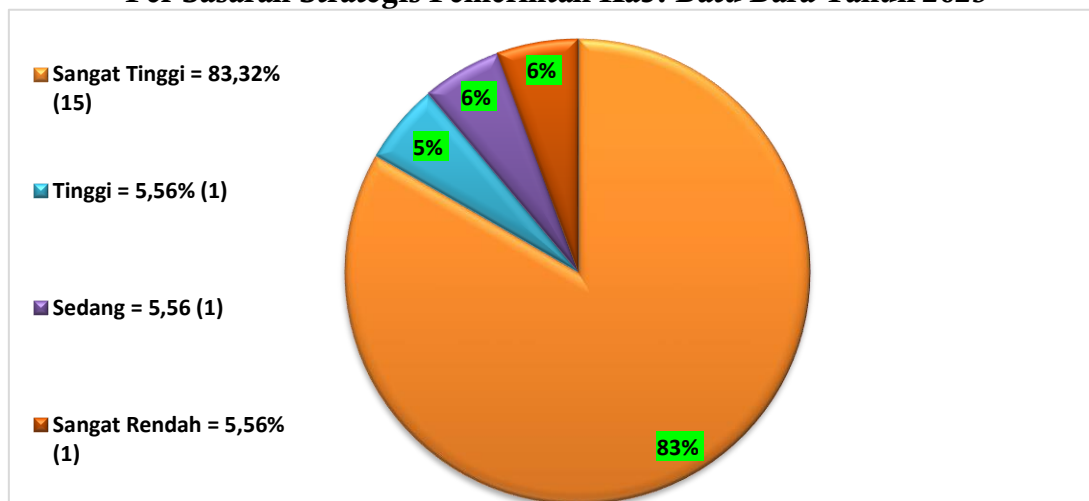
Tabel 3.4.
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	B	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	85,51	99,42	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	52,5 Triliun	52.433.590.714.397	99,87	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	80	80,82	101,3	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	Ha	5,50	0	0	Sangat rendah
6	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Persen	11,28	11,38	99,11	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan	Persen	16,00	11,85	74,06	Sedang

9	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	25,00	21,91	87,64	Tinggi
10	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	46,00	44,35	96,41	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB	Persen	19,96	18,37	92,03	Sangat Tinggi
12	Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	75,00	72,94	97,25	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45 (Inovatif)	53,77	118,15	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,71	72,63	104,19	Sangat Tinggi
15	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,60	8,50	98,84	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7073	0,6968	98,52%	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	Indeks	0,240	0,255	93,75%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2023 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.2.
Capaian Indikator Kinerja
Per Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara Tahun 2023



Tabel.3.5.
Predikat Pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Pemerintah Kab. Batu Bara 2022

NO	Rata-rata % capaian	Predikat	Jumlah Indikator
1	$\geq 90,01$	Sangat Tinggi	15
2	75,01 - 90	Tinggi	1
3	65,01 - 75	Sedang	1
4	50,01 - 65	Rendah	0
5	≤ 50	Sangat Rendah	1

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target tahunan yang dilakukan analisis terkait program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilannya serta permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut:

EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
2	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B 60	CC 55,63	92,72	B	B	100

Sasaran strategis ini merupakan upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023, yaitu “Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah atas Pelayanan Publik dan Investasi”. Untuk mengukur sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yakni opini BPK dan Nilai Evaluasi AKIP. Adapun rata-rata capaian dari kedua indikator ini adalah 100% dengan **predikat sangat tinggi**. Hasil pengukuran kinerja sasaran ini dapat dilihat pada penjelasan 2 indikator di bawah ini:

a. Opini BPK

Pencapaian keberhasilan indikator ini adalah sebesar 100%, dari target yaitu WTP dengan realisasi WTP. Perhitungannya didasarkan dari hasil pemeriksaan keuangan tahun 2022 untuk penggunaan anggaran tahun 2022. Hal ini disebabkan karena hasil pemeriksaan keuangan tahun 2023 belum selesai, sehingga untuk menghitung capaian ini menggunakan data tahun 2022.

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 62.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023 perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022, maka hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini merupakan keempat kalinya Pemerintah Kabupaten Batu Bara mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan yang disusun.

Pencapaian opini WTP tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama semua stakeholder dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat unit kerja, Perangkat Daerah hingga proses konsolidasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Batu Bara oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara. Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut :

Faktor Pendorong:

- a. Komitmen Kepala Daerah dan Inspektorat Kabupaten Batu Bara yang terus menerus melakukan monitoring untuk tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI.
- b. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan sebagai instrumen Aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c. Melakukan Kordinasi yang intensif dengan Pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Di samping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan pencapaian target peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dijumpai pula beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi program dan kegiatan. Berikut faktor penghambat yang sudah diidentifikasi:

1. Sistem Pengendalian Intern masih lemah di beberapa perangkat daerah.
2. Adanya kewajiban setor yang belum dilaksanakan akibat pegawai yang bersangkutan telah mutasi.
3. Terjadinya mutasi dan pergantian personil mengakibatkan kualitas SDM yang menangani penatausahaan dan pelaporan barang maupun keuangan masih belum memadai.

Berdasarkan pemantauan BPK, sebelum tindak lanjut terdapat 258 temuan, 723 saran dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 yang pelaksanaan tindak lanjutnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan status tindak lanjut sebanyak 662 sudah selesai, 58 belum selesai. Setelah tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah dari 728 jumlah saran sebanyak 664 sudah selesai dan 61 belum selesai.

b. Nilai Evaluasi AKIP

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP diukur sesuai dengan Permenpan No. 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian keberhasilan indikator ini adalah sebesar 100%, dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Bupati tahun 2023 yaitu B dan dengan realisasi B. Perhitungannya didasarkan dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2023 yang diterbitkan pada tahun 2023.

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/169/AA.05/2023 perihal: Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Kabupaten Batu Bara menerima predikat B dengan nilai 61,28. Tabel dibawah menggambarkan perkembangan nilai AKIP Kabupaten Batu Bara dari tahun 2018-2023:

Tabel 3.6.

Perkembangan nilai AKIP Kabupaten Batu Bara dari tahun 2018-2023

No	Tahun	Bobot	Nilai	Predikat
1	2018	100	37,05	C
2	2019	100	45.02	C
3	2020	100	55,63	CC
4	2021	100	56,35	CC
5	2022	100	60,55	B
6	2023	100	61,28	B

Berikut perbandingan nilai AKIP tahun 2022 dan 2023 perkomponen:

Tabel 3.7.

Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	20,05	20,41
2	Pengukuran Kinerja	30	14,70	14,93

3	Pelaporan Kinerja	15	9,23	9,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,57	16,61
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,55	61,28
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, dimana untuk mendapat predikat BB maka nilai yang harus diraih minimal 70, maka masih terdapat selisih angka 8,72, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan baik dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dalam usaha pencapaian indikator sasaran ini, beberapa upaya telah dilaksanakan yakni :

1. Dukungan komitmen Kepala Daerah dalam implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Batu Bara yang tercermin dengan adanya penanda tanggan fakta integritas peningkatan nilai sakip pada tahun 2022.
2. Telah dilaksanakan pendampingan baik oleh pihak Kementerian PAN RB maupun penggunaan jasa konsultan dalam penyempurnaan seluruh dokumen SAKIP pada 2023, seperti penyusunan Pohon kinerja, indikator kinerja utama dan lain-lainnya.
3. Membangun sistem aplikasi manajemen kinerja serta menggunakannya untuk menetapkan sistem reward dan punishment terhadap besaran tunjangan penghasilan pegawai.
4. Membangun sistem E-Sakip untuk memudahkan memonitoring capaian kinerja perangkat daerah dan memudahkan pengukuran dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kemenpan RB, terdapat kelemahan-kelemahan yang masih di jumpai dalam mengimplemetasikan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Batu Bara, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Belum menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja yang dapat menjadi acuan untuk seluruh PD dalam membuat dokumen perencanaan dan meningkatkan kualitas SAKIP;
 - b. Cascading/penjenjangan kinerja yang disusun belum spesifik

menggambarkan bagaimana pola crosscutting kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;

- c. Penjenjangan kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan kinerja. Hal tersebut mengakibatkan masih terdapat penetapan kinerja yang belum sesuai dengan level jabatannya. Contohnya pada PK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dimana terdapat kinerja yang sama persis antara Kepala Dinas dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak, yaitu indikator “Rasio kekerasan terhadap perempuan” dan “Rasio kekerasan terhadap anak”. Contoh lainnya, terdapat satu kinerja yang sama namun diampu oleh dua pejabat yang berbeda, yaitu sasaran “Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” dengan indikator “Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial” yang diampu oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial dan juga diampu oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Belum menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat membantu seluruh PD dalam melakukan pengukuran kinerja secara berkala;
- b. Aplikasi e-SAKIP yang diluncurkan pada tahun 2022 belum secara optimal digunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
- c. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja sebagian PD belum dipublikasikan secara umum melalui website;
- b. Laporan kinerja belum menyajikan benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat

regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional.

- c. Penyajian laporan kinerja level PD belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai untuk setiap indikator kinerja utama, seperti analisis ketercapaian, data pembanding (target, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan target jangka menengah), analisis efisiensi anggaran, faktor hambatan/pendukung, dan solusinya
 - d. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja yang tidak lebih baik dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada PK Bupati Batu Bara Tahun 2023, yaitu indikator “Tingkat partisipasi angkatan kerja” dengan target tahun 2023 adalah 73,50 persen, sedangkan realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2022 telah mencapai 73,50 persen. Contoh lainnya yang serupa seperti pada PK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2023, yaitu indikator “Angka Partisipasi Kasar pada Pendidikan Anak Usia Dini”
 - e. Dalam laporan kinerja level PD, terdapat beberapa indikator yang capaian kerjanya berada dibawah 75 persen. Contohnya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, yaitu indikator “Jumlah produksi Tanaman Holtikultura Bawang Merah” dengan capaian kinerja hanya sebesar 41,01 persen. Contoh lainnya pada Dinas Pendidikan indikator “Jumlah guru yang akan memperoleh sertifikasi profesi” dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata indikator “Jumlah kunjungan wisatawan”.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Hasil evaluasi internal belum sepenuhnya tepat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD;
 - b. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang mendalam dan menasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP;
 - c. PD belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh Inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja PD.

- d. Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Selain itu terdapat beberapa rekomendasi antara lain:

- a. Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja, pengukuran, dan pengumpulan data kinerja yang dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pengukuran kinerja baik pada tingkat pemerintah daerah maupun PD;
- b. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;;
- c. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD mengacu pada penjenjangan kinerja yang telah disusun sehingga tujuan dan sasaran strategis lebih berorientasi hasil sesuai dengan level jabatannya atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;
- d. Memanfaatkan hasil perbaikan pohon kinerja (cascading) untuk meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan, memilah program dan kegiatan yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi, serta memanfaatkannya dalam penetapan kinerja setiap level jabatan;
- e. Mengoptimalkan pengintegrasian aplikasi manajemen kinerja dan mendorong seluruh pegawai menggunakan aplikasi tersebut untuk pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara real time;
- f. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- g. Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level pemerintah daerah

- maupun PD dalam website kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
- h. Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;
 - i. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian/ tidak tercapainya kinerja organisasi, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional;
 - j. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP masing-masing PD, sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
 - k. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
 - l. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 - m. Menyusun kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP PD.

Selama tahun 2023 dalam proses pelaksanaan perbaikan yang disarankan dalam hasil evaluasi, Sekretariat Daerah, Bappelitbangda dan Inspektorat yang merupakan perangkat daerah utama pelaksana SAKIP, senantiasa berkordinasi dengan Kementerian PAN RB. Adapun upaya yang telah direncanakan akan dilakukan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan OPD dalam rangka mengidentifikasi dan memetakan pada *cascading* kinerja.
2. Melakukan Praevaluasi SAKIP Tahun 2024.
3. Meningkatkan kualitas SDM penyusunan laporan kinerja pada perangkat daerah dengan bimtek penyusunan laporan kinerja.
4. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan mengikuti diklat evaluasi SAKIP.
5. Melaksanakan Reviu atas LHE secara berjenjang.

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	83,57	98,65	86	85,51	99,43

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik

dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web yaitu **si sukma** (sistem informasi survei kepuasan masyarakat) yang dapat diakses melalui <https://bagianorganisasi.batubarakab.go.id/skm/site/home>. Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat melibatkan seluruh perangkat daerah. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah dan didukung beberapa Perangkat Daerah seperti Inspektorat Kabupaten Batu Bara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Berdasarkan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan aplikasi SI-SUKMA, yang melibatkan seluruh unit kerja diperoleh hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,51 dan dengan jumlah korespondensi sebanyak 40.503 orang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Loket pelayanan ditambah dan dipercepat, input data bisa dengan menggunakan pelayanan internet.
2. Pelayanan sangat lama dan harus bolak balik”.
3. Untuk proses layanan pembuatan KTP lebih dipercepat lagi, untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin.

4. Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
2. Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Selain itu penerapan mal pelayanan publik masih terkendala disebabkan belum adanya lahan untuk membangun gedung mal pelayanan publik. Faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Batu Bara adalah komitmen unit pelayanan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik untuk seluruh unit pelayanan. Selain itu dukungan Ombudsman RI dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukkan melalui hasil survey independent kepatuhan standar pelayanan publik dengan nilai 92,19 atau dengan predikat **zona hijau kualitas tertinggi**.

Capaian indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** sebesar 99,43% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati sebesar 86 dan realisasi kinerja nyata sebesar 85,51. Pencapaian Indikator ini masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80 poin, maka pencapaian tahun 2023 telah memenuhi target RPJMD.

Tindaklanjut yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara, antara lain:

- a. Meningkatkan sosialisasi.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik terkait prosedur pelayanan.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperoleh data hasil survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat pada Unit Kerja.
- d. Memberikan pendidikan dan latihan bagi petugas pelayanan.

Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Nilai	52,5 Triliun	51.765.552.775.397	98,60%	52,5 Triliun	52.433.590.714.397	99,87%

Salah satu tolok ukur kemakmuran dari suatu daerah dapat dilihat seberapa besar jumlah investasi/investor di daerah tersebut. Semakin banyak investor, semakin tinggi nilai investasi, tentunya akan mendorong daerah bersangkutan menjadi semakin makmur dan sejahtera.

Investasi memiliki hubungan erat dengan PDB suatu daerah. Jika investasi terhadap suatu daerah turun, maka PDB-nya akan turun juga. Sebaliknya, jika investasi mengalir deras, maka PDB akan memunculkan hasil yang gemilang.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara berupaya melakukan peningkatan investasi di Kabupaten Batu Bara. Sehingga menjadi target RPJMD 2019-2023 dengan indikator sebagai berikut:

Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perhitungan capaian indikator Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Realisasi Nilai Investasi}}{\text{Target Nilai Investasi}} \times 100 \\
 &= \frac{52.500.000.000.000}{52.433.590.714.397} \times 100\% \\
 &= 99,87\%
 \end{aligned}$$

Pada Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023 terdapat target peningkatan nilai investasi secara akumulatif sebesar Rp. 52.500.000.000,00 sedangkan realisasi kinerja nyata nilai inventasi yang tercapai tidak memenuhi target yang telah ditentukan, pencapaian hanya sebesar Rp. 52.433.590.714.397,00. Persentase capaian kinerja sebesar 99,87% termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

Berdasarkan LKPM Tahun 2023 yang dilaporkan secara daring melalui

system online single submission (OSS), pada tahun 2023 nilai Investasi Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 668.037.940.000,00. Terjadi penurunan sebesar 37,14% atau sebesar Rp. 394.662.179.629,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp. 1.062.700.119.628,00. Nilai akumulatif hingga tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir RPJMD hanya mencapai Rp. 52.433.590.714.397,00, sedangkan target akhir RPJMD sebesar Rp. 53.500.000.000.000,00, terdapat kekurangan yang lumayan besar sebanyak Rp. 1.066.409.285.603,00.

Berikut tabel nilai investasi yang bersumber dari PMDN dan PMA tahun 2022-2022:

Tabel 3.8.
Perbandingan Nilai Investasi Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Perusahaan	Nilai Investasi	
		2022	2023
1	PMDN	Rp. 39.223.152.159.987	Rp. 39.726.776.959.987
2	PMA	Rp. 12.765.552.774.397	Rp. 12.706.813.754.410
	Jumlah	Rp. 51.765.552.774.397	Rp. 51.433.590.714.397

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai investasi pada tahun 2023 mengalami penurunan di level Perusahaan Modal Asing. Menurun investasi ini disebabkan beberapa perusahaan mengalami penurunan nilai investasi pada asset yang dikelola. Kerangka pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Daerah merupakan kolaborasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki peran utama telah melakukan berbagai macam upaya seperti: peningkatan promosi penanaman modal, meningkatkan kualitas pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, merespon segala bentuk pengaduan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap perizinan. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan memberikan dukungan dengan konsep kebijakan peningkatan kualitas hubungan industri.

Namun demikian, masih ditemui hambatan-hambatan yang menjadi kendala pencapaian kinerja pada sasaran ini, antara lain:

1. Masih terdapat perusahaan yang belum melaporkan LKPM 2023 sehingga

investasinya tidak tercatat secara keseluruhan.

2. Belum adanya peta potensi investasi di Kabupaten Batu Bara, hal ini juga sangat mempengaruhi iklim investasi dimana investor enggan berinvestasi dikarenakan pemetaan yang belum jelas.
3. Indonesia memasuki tahun politik, yang membuat investor masih menunggu kestabilan politik di Indonesia maupun di daerah.

Berdasarkan data BPS tahun 2023 banyak perusahaan menurut jenis tanda daftar yang diterbitkan berjumlah 1.194. Terdapat 217 Perusahaan usaha besar menengah, sisanya UMKM bersifat perorangan. Namun berdasarkan data OSS yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari 217 perusahaan usaha besar menengah hanya 56 Perusahaan yang melaporkan LKPMnya di OSS, ini juga merupakan salah satu faktor tidak tercapainya nilai investasi yang ditargetkan pada akhir RPJMD 2023. Berikut daftar perusahaan yang telah melaporkan LKPM ditahun 2023:

Tabel. 3.9

**DATA PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN NILAI INVESTASI
TAHUN 2023**

N O	Nama Perusahaan	Status	Triwulan Pelaporan LKPM	SEKTOR	Nilai Investasi (Rupiah)	Nilai Investasi (Dollar)	TKI
1	ARYA RAMA PERSADA	PMDN	3	Industri Lainnya	-	-	7
				Industri Makanan	-	-	7
2	BAGASTA ABADI SENTOSA	PMDN	1	Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
			2	Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
			3	Perdagangan dan Reparasi	10.000.000	676	1
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
			4	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Transportasi,	-	-	0

				Gudang dan Telekomunikasi			
3	BIDADARI MEDIKAL NUSANTARA	PMDN	1	Jasa Lainnya	40.271.600.000	2.721.068	0
			2	Jasa Lainnya	22.700.000	1.534	39
			3	Jasa Lainnya	75.000.000	5.068	88
			4	Jasa Lainnya	595.700.000	40.250	24
4	BINA USAHA MINERAL INDONESIA	PMDN	1	Pertambangan	1.678.700.000	113.426	0
			2	Pertambangan	1.172.100.000	79.196	0
			3	Pertambangan	-	-	0
			4	Pertambangan	-	-	0
				Pertambangan	-	-	0
5	BIYU IYAS MALELA	PMDN	1	Industri Makanan	1.600.000.000	108.109	154
			2	Industri Makanan	6.300.000	426	20
			3	Industri Makanan	50.000.000	3.378	0
			4	Industri Makanan	-	-	10
6	BUANA SAWIT INDAH	PMDN	1	Industri Makanan	-	-	2
			2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	1
				Industri Makanan	-	-	1
			3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	4
				Industri Makanan	-	-	1
			4	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	1
				Industri Makanan	-	-	0
7	CITRARAYA PERKASA ABADI	PMDN	1	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
			2	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
			3	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
			4	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
8	DAYA INDAH YASA	PMDN	3	Perdagangan dan Reparasi	1.304.700.000	88.156	0
			4	Perdagangan dan Reparasi	27.700.000	1.872	0
9	DELI GRAHA PERSADA	PMDN	1	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	-	-	2
10	DOMAS AGROINTI PERKASA	PMDN	1	Industri Makanan	5.191.000.000	350.745	6
			2	Industri Makanan	3.379.000.000	228.312	0
			3	Industri Makanan	4.637.800.000	313.365	0
			4	Industri Makanan	-	-	1

11	DOMAS AGROINTI PRIMA	PMA	1	Industri Kimia Dan Farmasi	16.504.934.200	1.115.200	0
			2	Industri Kimia Dan Farmasi	51.120.630.999	3.454.100	1
				Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
			3	Industri Kimia Dan Farmasi	35.083.362.118	2.370.500	0
				Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
			4	Industri Kimia Dan Farmasi	14.900.632.924	1.006.800	1
12	DOMAS SAWITINTI PERDANA	PMDN	1	Industri Makanan	198.800.000	13.433	3
			2	Industri Makanan	285.000.000	19.257	1
			3	Industri Makanan	1.578.200.000	106.635	0
			4	Industri Makanan	2.997.900.000	202.561	0
13	ELANG SUMATERA	PMDN	3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	0
				Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
				Industri Karet dan Plastik	-	-	0
				Industri Lainnya	-	-	0
				Listrik, Gas dan Air	-	-	0
				Konstruksi	1.700.000.000	114.865	0
				Konstruksi	-	-	0
				Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Hotel dan Restoran	-	-	0
			4	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	0
				Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
				Industri Karet dan Plastik	-	-	0
				Industri Lainnya	-	-	0
				Listrik, Gas dan Air	-	-	0
				Konstruksi	90.000.000	6.081	0
				Konstruksi	-	-	0
				Konstruksi	-	-	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Hotel dan Restoran	-	-	0
14	FLORA SAWITA CHEMINDO	PMDN	1	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	1
			2	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
			3	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0

			4	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
15	HONG LIE OLEO CHEMICAL INDONESIA	PMDN	1	Industri Kimia Dan Farmasi	10.400.000.000	702.706	10
			2	Industri Kimia Dan Farmasi	9.700.000.000	655.408	0
			3	Industri Kimia Dan Farmasi	9.600.000.000	648.649	0
			4	Industri Kimia Dan Farmasi	10.150.000.000	685.812	0
				Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
16	INDO BALAI GREEN ENERGY	PMA	3	Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
17	INDONESIA ALUMINIUM ALLOY	PMDN	1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	13.736.200.000	928.126	16
			3	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	3
18	INTI BANGUN SEJAHTERA	PMDN	1	Konstruksi	-	-	0
			3	Konstruksi	-	-	0
19	JAYA PRATAMA SAWIT	PMDN	2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	0
				Industri Makanan	2.000.000.000	135.136	24
				Perdagangan dan Reparasi	1.100.000.000	74.325	1
			3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	0
				Industri Makanan	1.250.000.000	84.460	0
				Perdagangan dan Reparasi	1.100.000.000	74.324	0
20	JUST OIL & GRAIN INDONESIA	PMA	4	Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
21	KALTIMEX MOBIOL INDONESIA	PMA	1	Industri Makanan	1.044.878.367	70.600	2
				Jasa Lainnya	1.044.878.367	70.600	2
			2	Industri Makanan	1.292.038.762	87.300	4
				Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	2
				Industri Lainnya	-	-	2
				Perdagangan dan Reparasi	-	-	2
				Jasa Lainnya	1.292.038.762	87.300	2
			3	Industri Makanan	-	-	0
				Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
				Industri Lainnya	-	-	0
				Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
			4	Industri Makanan	217.559.897	14.700	0
				Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
				Industri Lainnya	-	-	0

				Jasa Lainnya	867.279.588	58.600	0
22	KARSA PRIMAPERMAT A NUSA	PMDN	1	Industri Mineral Non Logam	-	-	0
			2	Industri Mineral Non Logam	129.200.000	8.730	0
			3	Industri Mineral Non Logam	-	-	0
23	KARYA PRATAMA NIAGAJAYA	PMDN	1	Industri Makanan	2.585.100.000	174.670	4
			2	Industri Makanan	41.400.000	2.797	3
			3	Industri Makanan	1.337.300.000	90.358	6
			4	Industri Makanan	1.715.700.000	115.926	0
24	MADJIN CRUMB RUBBER FACTORY	PMDN	1	Industri Karet dan Plastik	129.800.000	8.770	0
			2	Industri Karet dan Plastik	860.700.000	58.156	0
			3	Industri Karet dan Plastik	-	-	0
			4	Industri Karet dan Plastik	281.900.000	19.047	0
25	MARITIME NETWORK INDONESIA	PMA	3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1.000.478.920	67.600	0
26	MIDI UTAMA INDONESIA Tbk.	PMDN	3	Perdagangan dan Reparasi	22.000.000	1.486	0
27	MULTIMAS NABATI ASAHAN	PMA	2	Industri Makanan	439.559.579	29.700	0
				Listrik, Gas dan Air	-	-	0
			3	Industri Makanan	-	-	0
28	PANGANMAS INTI NUSANTARA	PMA	1	Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
			2	Industri Makanan	-	-	0
			3	Industri Makanan	-	-	0
				Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
				Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
			4	Industri Makanan	-	-	0
29	PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	PMDN	1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	0
			2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	0
			3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	0
			4	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	0
30	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1.012.700.000	68.426	0
			2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	732.100.000	49.466	207
			3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4.040.500.000	273.007	200
31	PERUSAHAAN LISTRIK	PMDN	1	Listrik, Gas dan Air	-	-	0

	NEGARA (PERSERO)		2	Listrik, Gas dan Air	-	-	0
			3	Listrik, Gas dan Air	-	-	0
			4	Listrik, Gas dan Air	-	-	0
32	PERUSAHAAN PERKEBUNAN, INDUSTRI & DAGANG KWALA GUNUNG	PMDN	2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	21.061.900 .000	1.423.107	0
			3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	-	-	1
			4	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	-	-	0
33	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDONESIA ASAHAAN ALUMINIUM	PMDN	4	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	20.517.100 .000	1.386.293	0
34	PETRO ANDALAN NUSANTARA	PMA	1	Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
			2	Perdagangan dan Reparasi	8.879.991	600	0
			3	Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
35	PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK.	PMDN	1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	7.990.800. 000	539.922	0
				Industri Makanan	408.800.00 0	27.622	0
			2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	6.866.800. 000	463.975	0
				Industri Makanan	-	-	1
			3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	-	-	0
				Industri Makanan	-	-	0
				Perdagangan dan Reparasi	22.600.000	1.527	0
			4	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	16.246.700 .000	1.097.752	0
				Industri Makanan	49.500.000	3.345	0
36	PP PRESISI TBK	PMDN	3	Industri Mineral Non Logam	-	-	20
37	PRIMA MULTI TERMINAL	PMDN	4	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	313.000.00 0	21.149	0
38	PRIMA PENGEMBANGA N KAWASAN	PMDN	2	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	272.245.00 0.000	18.395.010	0
			3	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	4.141.100. 000	279.804	0
			4	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	-	-	0
39	PRIMA TANGKI INDONESIA	PMA	1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	294.519.54 0	19.900	0

			3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1.644.278.225	111.100	0
			4	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	180.559.914	12.200	0
40	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	PMDN	4	Konstruksi	-	-	0
41	PT. KERETA API INDONESIA	PMDN	1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
			2	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
			3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
42	RENTOKIL INDONESIA	PMA	1	Jasa Lainnya	-	-	0
			2	Jasa Lainnya	-	-	0
			3	Jasa Lainnya	-	-	0
			4	Jasa Lainnya	-	-	0
43	REZEKI TIGA SERANGKAI	PMDN	4	Konstruksi	300.000.000	20.270	0
44	SARANA INDUSTAMA PERKASA	PMDN	1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	482.900.000	32.629	2
			2	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1.641.000.000	110.879	0
			3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5.657.400.000	382.257	1
			4	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
				Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	-	-	0
45	SARANA PETRO DINAMIKA	PMDN	1	Perdagangan dan Reparasi	80.200.000	5.419	0
46	SAWIT MAS AGRO PERKASA	PMDN	1	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
			2	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
			3	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
			4	Industri Kimia Dan Farmasi	-	-	0
47	SEI BALAI GREEN ENERGY	PMA	1	Industri Makanan	-	-	4
			2	Industri Makanan	-	-	4

			3	Industri Makanan	-	-	1
			4	Industri Makanan	-	-	2
48	SOCFIN INDONESIA	PMA	1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	11.586.901 .888	782.900	45
				Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	0
			2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	8.934.751. 436	603.700	70
			3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	11.196.187 .911	756.500	606
				Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	0
				Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	0
				Jasa Lainnya	-	-	0
49	SUKSES BAHTERA INDONESIA	PMDN	2	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	-	-	0
50	SUMATRASARA NA SEKARSAKTI	PMDN	1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	-	0
			3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	13.300.000	899	0
51	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	4	Perdagangan dan Reparasi	1.026.500. 000	69.358	0
52	SUMBER SAWIT MAKMUR	PMDN	2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	-	-	0
				Industri Makanan	485.100.00 0	32.777	0
			3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	-	-	0
				Industri Makanan	1.184.300. 000	80.020	92
			4	Industri Makanan	2.219.600. 000	149.973	0
53	SUMBETRI MEGAH	PMDN	1	Industri Mineral Non Logam	-	-	0
				Listrik, Gas dan Air	-	-	0
				Perdagangan dan Reparasi	-	-	0
			2	Listrik, Gas dan Air	-	-	0
			3	Listrik, Gas dan Air	-	-	0
54	SUPRA MATRA ABADI	PMDN	1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	-	-	0
				Industri Makanan	-	-	0
			3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	475.700.00 0	32.142	0
				Industri Makanan	66.600.000	4.500	0
			4	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	877.300.00 0	59.277	0
				Industri Makanan	454.800.00	30.730	0

					0		
55	TELEKOMUNIKASI SELULAR	PMA	3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1.958.037.886	132.300	0
			4	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2.505.638.810	169.300	0
56	WILMAR PADI INDONESIA	PMA	2	Industri Makanan	433.639.584	29.300	0
			3	Industri Makanan	433.639.532	29.300	0
			4	Industri Makanan	427.719.797	28.900	3
	Grand Total				668.037.826.995	45.137.836	1.718

Beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam rangka meningkatkan kualitas penanaman modal pada tahun mendatang, antara lain:

- Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- Adanya jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan.
- Terciptanya daya saing daerah.
- Adanya integrasi pelayanan baik antar propinsi, kabupaten/kota, dinas maupun antar lembaga dan pihak terkait.
- Meningkatkan mutu pelayan dibidang perizinan.
- Melakukan kunjungan langsung ke perusahaan untuk mendata LKPM sejak awal tahun 2023.
- Menyelenggarakan pelayanan secara elektronik, dengan cara:
 - Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.
 - Menciptakan sub-sistem pelayanan informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta adanya sub-sistem pendukung.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi	%	78,28%	78,28%	100%	80%	80,82%	101,3

	Mantap							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Pembangunan infrastruktur dilakukan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Batu Bara dan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi. Penguatan konektivitas antarwilayah juga berguna memperkuat kinerja perekonomian, serta meningkatkan perekonomian masyarakat

Sasaran Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja jaringan jalan, memiliki 1 (satu) indikator sebagai berikut:

Panjang jalan dalam kondisi mantap

Perhitungan pencapaian kinerja nyata Panjang jalan dalam kondisi mantap diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Target Panjang Jalan Kabupaten Batu bara}} \times 100 \\
 &= \frac{80}{80,82} \times 100\% \\
 &= 101,3\%
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja tahun 2023 sebesar **101,3%** termasuk kategori **sangat tinggi**, berasal dari perhitungan target penyelesaian panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 80% dan realisasi sebesar 80,82%.

Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 227/PUPR/2017, Kabupaten Batu Bara memiliki panjang jalan kewenangan sepanjang 639,079 Km. Berdasarkan data dasar prasarana jalan per Desember tahun 2023 dari bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara bahwa jumlah panjang jalan Kabupaten Batu Bara dengan kondisi baik dan sedang pada tahun 2023 sudah mencapai 516,611 Km. berikut tabel kondisi jalan mantap di Kabupaten Batu Bara selama periode tahun 2019-2023.

Tabel 3.10.

Kondisi jalan mantap Kabupaten Batu Bara periode 2019-2023

No	Kondisi Jalan	Panjang (Km)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	321,090	345,626	396,410	402,735	431,106

2	Sedang	35,364	114,723	098,651	97,519	85,405
Jumlah		356,454	460,349	495,061	500,254	516,611

Dari data diatas, kondisi panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2023 sudah mencapai 80,82% atau sudah mencapai 516,611 Km Km dari panjang jalan Batu Bara sepanjang 639,079 Km. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 78,28% capaian tahun 2023 meningkat sebesar 2,54% yang artinya panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 telah bertambah sebesar 16,257 Km. Dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 80% atau 511,263 km, maka capaian kinerja ini telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang adalah pengampuh dari Pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan**, yang ditunjang oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagai berikut:

Tabel 3.11

**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Penyelenggaraan Jalan	108.820.162.956,00	79.530.274.841,00	73,08	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik meningkat menjadi 67,46%
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	108.820.162.956,00	79.530.274.841,00	73,08	Terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten (ditingkatkan, direhabilitasi, dan dipelihara) sepanjang 32,8 Km
1)	Rekonstruksi Jalan	97.303.920.734,00	73.292.258.739,00	75,32	Terlaksananya peningkatan/rekonstruksi jalan sepanjang 15 km
2)	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.936.722.222,00	5.356.684.518,00	77,22	Terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 17,8 km

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja jalan mantap Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dalam memenuhi target yang direncanakan dipengaruhi beberapa

faktor sebagai berikut:

1. terdapat beberapa pekerjaan jalan untuk meningkatkan rekontruksi jalan sebesar Rp. 97.303.920.734 atau sepanjang 15 Km;
2. adanya kegiatan pemeliharaan rutin jalan TA. 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.936.722.222,- dalam rangka mempertahankan kondisi jalan mantap yang ada agar tidak menjadi rusak, sehingga dengan anggaran tersebut telah dilaksanakan pemeliharaan jalan sepanjang 17,8 Km.

Sasaran Meningkatnya infrastruktur permukiman

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	Ha	4,75	757,41	1,59	5,5	0	0

Pada sasaran Meningkatnya infrastruktur permukiman, indikator kinerja nyata adalah “Jumlah kawasan kumuh yang tertangani”. Untuk melihat capaian kinerja pada tahun 2023 mengatasi wilayah kumuh di Kabupaten Batu Bara, dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

Jumlah kawasan kumuh yang tertangani

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 714/Perkim/2022 tanggal 8 Desember 2022 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh dan Lokasi Potensi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Batu Bara, terdapat 227,05 Ha luasan kumuh di Kabupaten Batu Bara. Untuk lebih rincinya dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 3.12.

Lokasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Batu Bara dan Tingkat Kekumuhan

No	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1	Desa Bogak Kec. Tanjung Tiram	7,06	Kumuh sedang
2	Kelurahan Bagan Arya Kec. Tanjung Tiram	11,02	Kumuh Sedang
3	Desa Suka Maju Kec. Tanjung Tiram	11,06	Kumuh sedang

4	Desa Bandar Rahmad Kec. Tanjung Tiram	5,75	Kumuh Berat
5	Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram	11,29	Kumuh Sedang
6	Desa Sentang Kec. Talawi	4,68	Kumuh Sedang
7	Desa Tali Air Kec. Nibung Hangus	7,23	Kumuh sedang
8	Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram	6	Kumuh sedang
9	Desa Kapal Merah Kec. Tanjung Tiram	5,49	Kumuh berat
10	Kelurahan Pangkalan Dodek Kec. Medang Deras	3,68	Kumuh Sedang
11	Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras	7,31	Kumuh sedang
12	Desa Nenas Siam Kec. Medang Deras	10,60	Kumuh sedang
13	Kelurahan Pagurawan Kec. Medang Deras	11,43	Kumuh Sedang
14	Desa Lalang Kec. Medang Deras	26,22	Kumuh ringan
15	Kelurahan Labuhan Ruku Kec. Talawi	5,45	Kumuh Ringan
16	Desa Indra Yaman Kec. Talawi	17,12	Kumuh ringan
17	Desa Benteng Kec. Talawi	5,2	Kumuh Ringan
18	Desa Dahari Selebar Kec. Talawi	30,61	Kumuh ringan
19	Desa Kwala Indah Kec. Sei Suka	7,40	Kumuh Berat
20	Desa Kuala Sikasim Kec. Sei Balai	15,28	Kumuh sedang
21	Desa Benteng I Kec. Talawi	6,26	Kumuh Ringan
22	Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram	16,19	Kumuh Sedang

Kehadiran pemukiman kumuh tentunya memberatkan beban kota yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan, meningkatkan resiko kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan menurunnya kualitas pelayanan sarana/prasarana. Penanggulangan Kawasan kumuh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Luasan wilayah dibawah 10 Ha menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Berikut ditampilkan Kawasan kumuh yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Batu Bara:

Tabel 3.13
Perbandingan Kawasan kumuh setelah di verifikasi

No	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1	Desa Bogak Kec. Tanjung Tiram	7,06	Kumuh sedang
2	Desa Bandar Rahmad Kec. Tanjung Tiram	5,75	Kumuh Berat
3	Desa Sentang Kec. Talawi	4,68	Kumuh Sedang
4	Desa Tali Air Kec. Nibung Hangus	7,23	Kumuh sedang
5	Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram	6	Kumuh sedang
6	Desa Kapal Merah Kec. Tanjung Tiram	5,49	Kumuh berat
7	Kelurahan Pangkalan Dodek Kec. Medang Deras	3,68	Kumuh Sedang
8	Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kec. Medang Deras	7,31	Kumuh sedang
9	Kelurahan Labuhan Ruku Kec. Talawi	5,45	Kumuh Ringan
10	Desa Benteng Kec. Talawi	5,2	Kumuh Ringan
11	Desa Kwala Indah Kec. Sei Suka	7,40	Kumuh Berat
12	Desa Benteng I Kec. Talawi	6,26	Kumuh Ringan

Terdapat 12 lokasi Kawasan kumuh yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang harus di selesaikan dengan luasan sebesar 71,51 Ha Kawasan kumuh.

Untuk mengatasi pemukiman kumuh ini, terdapat 7 (tujuh) variabel yang harus ditangani dan ditata oleh beberapa organisasi perangkat daerah, yaitu:

1. Bangunan Gedung
2. Jalan Lingkungan
3. Penyediaan Air Minum
4. Drainase Lingkungan
5. Pengelolaan Air Limbah
6. Pengelolaan Persampahan
7. Proteksi Kebakaran.

Faktor kendala terbesar yang dihadapi dalam penanganan kawasan kumuh ini adalah ketidak adaan data yang komplit dalam menentukan luasan daerah

kumuh dan kebutuhan daerah tersebut, sehingga perangkat daerah terkait penanganan kawasan kumuh tidak fokus dan tidak bersinergi satu dengan lainnya. Selain itu tidak adanya pengaturan mengenai rumah terlantar dan pengelolaannya memberikan ketidakpastian terhadap pengelolaan (pemanfaatan dan pemeliharaan) rumah tersebut.

Namun bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan untuk penanganan kawasan kumuh ini. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu bagian dari pengembangan perumahan. Tujuan kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni adalah karena masih banyaknya masyarakat di kawasan kumuh yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal ini dikarenakan kurang mampunya masyarakat yang tinggal disana untuk memperbaiki tempat tinggal atau rumah mereka. Kegiatan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini berupa bantuan material yang diberikan kepada masyarakat yang secara peraturan berhak membutuhkan bantuan agar dapat membantu meringankan beban masyarakat dengan ekonomi rendah dalam meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni.

Hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah dalam penanganan Kawasan kumuh dimasa yang akan datang adalah:

1. Membenahi permasalahan basis data sehingga terbentuk skema kerja perangkat daerah penanganan Kawasan kumuh.
2. Mengoptimalkan pendanaan dari sumber-sumber lainnya, misalnya CSR dan penggunaan dana desa.
3. Mengefektifkan keterlibatan masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Capaian kinerja pada sasaran ini sangat rendah, sebesar 0%, hal ini disebabkan sampai dengan laporan kinerja ini selesai disusun, Dinas Perumahan dan Kawasan Kumuh belum selesai melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap penangan Kawasan kumuh tahun 2023. Kesulitan menghitung capaian ini disebabkan karena upaya-upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Kumuh saja tetapi ada beberapa perangkat daerah, dimana masing-masing perangkat daerah bergerak masing-masing, tidak memfokuskan pada satu daerah tertentu, sehingga

penanganan kawasan kumuh belum mencakup 7 variabel utama penanganan kawasan kumuh tersebut di suatu daerah.

Sasaran Terkendalinya pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri	Persen	100	100	100	100	100	100

Industri merupakan salah satu penggerak utama ekonomi wilayah yang akan berperan dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Pengembangan kawasan industri di suatu daerah membutuhkan dasar berupa rencana tata ruang dan wilayah. Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memiliki 2 (dua) Peraturan Daerah terkait rencana tata ruang dan wilayah, sebagai upaya mendorong pengembangan kawasan industri, yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung Tahun 2020 – 2040.

Upaya Pemerintah pusat untuk mengajak pemerintah daerah tingkat I dan II untuk segera menyelesaikan rencana tata ruang dan wilayah di masing-masing daerah, telah ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Adapun Sasaran Terkendalinya pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri, memiliki 1 (satu) indikator yang dapat disimak pada penjelasan dibawah ini:

Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri.

Pengendalian pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diberikan. Indikator kinerja ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rekapitulasi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diterbitkan tahun 2023 dan sesuai hasil pemantauan dilapangan diketahui bahwa dari 120 subjek pemohon tidak ada peruntukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran ini **sesuai target** yang direncanakan/ diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian ini **tetap** konsisten dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan konsep kebijakan yang disusun dan dituangkan dalam peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Batu Bara, persentase terselenggaranya pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang didukung oleh beberapa perangkat daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki konsep kebijakan Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai perangkat daerah penyedia data dalam pengembangan daerah.

Dalam rangka perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja dan realisasi meningkatnya perencanaan dan pemanfaatan ruang, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program kegiatan sesuai dengan target *ouput* dan *outcome* yang ingin dicapai;

2. Melakukan pendataan terhadap kebutuhan bangunan gedung daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam mengukur kinerja program dan kegiatan;
3. melakukan pendataan dan perencanaan program kegiatan bidang pertanahan yang berkaitan dalam mendukung perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh beberapa factor, antara lain:

1. Tersedianya SDM sebagai petugas administrasi dan petugas lapangan;
2. Didukung dengan pendanaan yang cukup;
3. Kolaborasi dari seluruh perangkat daerah terkait, terutama pihak DPMPTSP;
4. Terhadap program yang sesuai.

Kinerja nyata terhadap indikator ini mencapai 100% dan memenuhi target 100% yang telah ditetapkan pada Perjanjian Bupati. Persentase capaian indikator ini sebesar 100% termasuk dalam Kategori **Sangat Tinggi**.

Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kemiskinan	Persen	11,51	11,53	99,83	11,28	11,38	99,11

Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan diukur dengan Angka kemiskinan BPS yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Berikut penjelasan ketercapaian sasaran yang diukur dengan indikator persentase kemiskinan:

Persentase Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara tak lepas dari masalah kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas nilai rupiah pengeluaran konsumsi (makanan dan non makanan) perkapita perbulan. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan diukur dengan angka yang ditetapkan BPS, Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, untuk Tahun 2023, garis kemiskinan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 556.529,00 perkapita perbulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan *baseline* untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin.

Berdasarkan tolok ukur tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batu Bara tahun 2023 diperkirakan sebanyak 49.180 jiwa. Jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2023, yang oleh BPS diestimasi sekitar 430.533 Jiwa, maka diketahui bahwa tingkat kemiskinannya adalah 11,53.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,15 pada tahun 2023. berikut disajikan angka kemiskinan Kabupaten Batu Bara selama lima tahun, sebagai berikut:

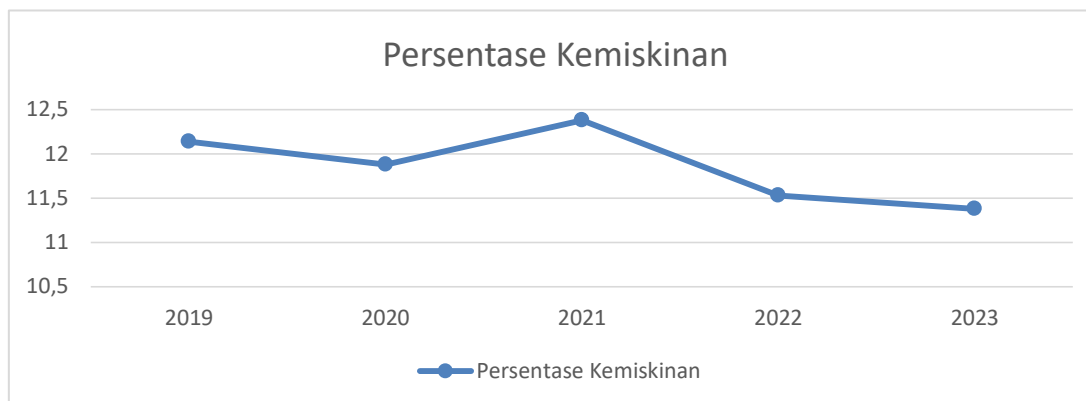
Tabel 3.14.
Persentase Angka Kemiskinan 2019-2023

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase
2019	50.460	12,14
2020	49.780	11,88
2021	52.590	12,38
2022	49.390	11,53
2023	49.180	11,38

Berdasarkan data tabel diatas, persentase kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 12,38%, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 52,590 jiwa. Berikut ditampilkan grafik persentase kemiskinan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Grafik 3.3.

Persentase Kemiskinan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat persentase kemiskinan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Persentase capaian kinerja untuk indikator ini terealisasi sebesar 99,11% dari target sebesar 11,28% dan realisasi sebesar 11,38%, masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Walau mengalami penurunan sebesar 0,1% tetapi target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Meski mengalami penurunan, jika dibandingkan Angka Kemiskinan Sumatera Utara (8,15) dan Nasional (9,36%), angka kemiskinan Kabupaten Batu Bara relative lebih tinggi. Untuk pencapaian target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 11,28, realisasi 2023 masih belum tercapai sebesar 0,1%.

Secara umum, faktor yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi kinerja, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
5. Telah menyusun rencana aksi pemberantasan kemiskinan.

Selain itu terdapat juga faktor kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi (5,88), sehingga berakibat langsung pada peningkatan kemiskinan;
2. Secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan;
3. Masih Banyaknya ditemukan perkawinan pada usia dini.
4. Pola distribusi yang kurang tepat, misalnya pada bahan pangan minyak goreng, di Batu Bara terdapat industri pengolahan minyak goreng, namun distributornya diberada di kabupaten lain. Hal ini berdampak pada transportasi distribusi. Begitu juga terjadi pada beberapa bahan pangan pertanian, dimana para penampung (agen) tidak memasarkan hasil pertanian di Batu Bara tetapi mengirim/menjualnya ke provinsi atau kota lain.

Sebagai solusi alternatif yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

1. Memperbaharui data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial, sehingga target penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Non Tunai yang dianggarkan pemerintah selama pandemi tepat sasaran.
2. Meningkatkan anggaran Bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk miskin.
3. Melakukan studi kemiskinan pada tahun 2024 dengan menggunakan jasa akedemisi, sehingga informasi akurat terkait masalah penyebab kemiskinan bisa menjadi rekomendasi penyusunan kebijakan.
4. Melakukan pendataan pada setiap zona kemiskinan ekstrim, pengembangan usaha yang bisa dilakukan bagi masyarakat dengan program padat karya.

Dalam rangka mencapai sasaran menurunkan angka kemiskinan ini, terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang saling terkait, Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara (Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan serta Peningkatan Kualitas Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat), Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara (Peningkatan Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja, Peningkatan Kualitas Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Peningkatan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja), Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Kabupaten Batu Bara (Peningkatan Kualitas Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm), Dinas Pendidikan (Jaminan Pendidikan), dan Dinas Kesehatan (Jaminan Kesehatan), Dinas Perkim dengan bantuan rumah tidak layak huni.

Selain itu terdapat Perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendukung seperti Dinas Sosial dan Bapelitbangda sebagai penyedia data.

Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	13,67	13,67	100	16	11,06	74,06

Sasaran meningkatnya pendapatan daerah, Memiliki Indikator sebagai berikut:

Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap Pendapatan diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Seluruh Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{149.917.985.464,70}{1.265.189.663.884,55} \times 100\% \\
 &= 74,06\%
 \end{aligned}$$

Persentase PAD terhadap Pendapatan merupakan ratio perbandingan kontribusi PAD dengan total penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap anggaran belanja daerah menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.

Persentase capaian kinerja indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan

sebesar 74,06% termasuk kategori **rendah**, berasal dari perhitungan target 16,00 % dan realisasi sebesar 11,85%. Pencapaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022. Untuk pencapaian target akhir RPJMD sebesar 16% pencapaian tahun 2023 masih kurang sebesar 4,15% lagi.

Pada tahun 2023 total jumlah pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 1.265.189.663.884,55 lebih tinggi jika dibandingkan dengan total pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.185.019.396.981,00. Dari total keseluruhan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara tersebut, Pendapatan Asli Daerah baik yang berasal dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mencapai 11,06% atau sebesar Rp. 149.917.985.464,7. Komposisi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara periode 2022 dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dana Pendapatan Transfer memberikan kontribusi untuk sumber pendapatan daerah sebesar 88,15% atau sebesar Rp. 1.115.271.678.419,85.

Upaya pencapaian indikator ini menjadikan Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah utama dalam pelaksanaan dan pengambilan kebijakan. Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Tekhnis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Batu Bara (Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh). Adapun jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Parkir.

Untuk sektor Retribusi Daerah kebijakan diserahkan tugas pemungutan retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Badan Pendapatan daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Badan Pendapatan Daerah merupakan Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perangkat daerah

pemungut retribusi antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah), Retribusi Pelayanan Kebersihan /Pertamanan (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup), Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi PKB (Dinas Perhubungan), Retribusi Pelayanan Pasar - Kios (Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan), Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja), Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), Retribusi Pelayanan Tera Ulang - (Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kendaraan Bermotor), Retribusi Tempat Pelalangan Ikan (TPI), Retribusi Tempat Pelelangan Ternak - (Dinas Perikanan dan Peternakan), Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - (Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan - (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu).

Beberapa faktor penghambat yang terjadi pada tahun 2023 antara lain:

1. Sebagian WP yg terdaftar tidak taat membayar pajak
2. Rendahnya kesadaran Masyarakat dalam melakukan pembayaran
3. Minimnya Masyarakat yang mengajukan BPHTB
4. Potensi pendapatan asli daerah belum terexploire dengan optimal
5. Potensi terbatas surat ketetapan pajak.

Solusi alternatif yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan Intensifikasi dengan Pelaksanaan Penyuluhan & Peningkatan Pengawasan
2. Melakukan Ekstensifikasi dengan cara penjaringan Wajib Pajak baru melalui Pendataan/Pendaftaran/Menggali Potensi PAD Baru
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak
4. Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak

Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	25	21,08	84,32	25	21,91	87,64

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, peternakan terhadap PDRB, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara sebesar 21,91% dan memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Batu Bara.

Pencapaian Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dengan indikator Kontribusi sektor pertanian/kehutanan/perikanan terhadap PDRB sebesar 87,64% berasal dari target 25% dan realisasi 21,91% termasuk kategori **tinggi**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,83% namun jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 27%, pencapaian 21,08% ini masih kurang 5,92% lagi.

Kinerja kontribusi sektor pertanian/kehutanan/perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Batu Bara lebih berfokus kepada sektor pertanian dan perikanan, dan untuk sektor kehutanan menjadi wewenang Provinsi Sumatera Utara.

Peranan kontribusi dari sektor pertanian dan perikanan dapat dapat disimak pada keterangan berikut:

Kontribusi Sektor Pertanian

Tidak dapat dipungkiri, salah satu potensi utama sumber daya alam yang menonjol di Kabupaten Batu Bara adalah potensi pertanian. Namun pada tahun 2023 produksi padi mengalami penurunan panen sebesar 14,83% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Produksi padi sawah pada tahun 2023 mencapai 131.573,52 ton dengan rata-rata produksi 55,87 kw/ha. Hal ini disebabkan karena luas lahan

sawah yang berkurang akibat alih fungsi lahan pertanian. Luas tanam pada tahun 2022 sebesar 30.981,30 Ha dan pada tahun 2023 luas tanam sebesar 23.490,37 Ha terjadi pengurangan lahan sekitar 7.490,93 Ha lahan persawahan. Berkurangnya luas tanam memberikan dampak penurunan pada luas panen, pada tahun 2022 luas panen sebesar 28.344,10 dengan rata-rata panen sebesar 160.909,46 ton, sedangkan pada tahun 2023 luas panen menjadi sebesar 23.549,94 Ha dengan rata-rata panen 131.573,52 Ton.

Selain padi, komoditas utama tanaman pangan lain yang juga menjadi prioritas adalah jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau. Untuk tanaman hortikultura yang menjadi prioritas adalah cabai merah dan Bawang merah. Dengan demikian, secara alami, produksi pertanian di Kabupaten Batu Bara sangat berpeluang mencapai angka yang tinggi.

Untuk lebih jelasnya perbandingan luas lahan dan luas panen masing-masing komoditi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

Perbandingan luas lahan tanam dan luas panen dan rata-rata produksi masing-masing komoditi

No	Komoditi	Luas Lahan Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)	
		2022	2023	2022	2023
1	Padi	30.981,30	23.490,37	28.344,10	23.549,94
2	Jagung	433,60	152,90	299,50	157,90
3	Kedelai	0,2	76	0,2	65,8
4	Kacang Tanah	1,2	7,92	0,60	8,88
5	Kacang Hijau	7,40	6	9,50	5,80
6	Ubi Kayu	460	402,50	437,3	303,90
7	Ubi Jalar	0,50	10,88	1,00	21,72

Sumber Data: Barada 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat terjadi penambahan luas lahan tanam untuk komoditi jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi jalar. Sementara luas lahan tanaman padi, kacang hijau dan ubi kayu mengalami penurunan.

Secara rinci perkembangan produksi tanaman pangan komoditas unggulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.16
Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2022-2023

No	Komoditi	Produksi (Ton)		Perkembangan
		2022	2023	
1	Padi	160.909,46	131.573	-29.336,46
2	Jagung	1.759,56	821,08	-938,48
3	Kedelai	0,34	52,64	52,30
4	Kacang Tanah	0,60	9,41	-3,47
5	Kacang Hijau	10,84	7,37	8,81
6	Ubi Kayu	15.519,8	11.396,25	-4.123,55
7	Ubi Jalar	21,70	440,91	429,21

Sumber Data: BPS; Barada 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat, perkembangan peningkatan tertinggi adalah komoditi kacang kedelai, meningkat sebesar 52,30 ton dari tahun sebelumnya dan penurunan tertinggi adalah komoditi padi, menurun sebesar 29.336,46 ton.

Kontribusi Sektor Perikanan

Sektor perikanan dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap diklasifikasikan menjadi penangkapan ikan dilaut dan penangkapan ikan di perairan umum, sedangkan perikanan budidaya diklasifikasikan atas jenis budidayanya, seperti budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung dan sawah.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, Panjang Garis Pantai Kabupaten Batu Bara sepanjang 62 Km dengan 6 Kecamatan Pesisir yang berbatasan langsung dengan selat malaka. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Batu Bara memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan baik untuk usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Salah satu potensi perikanan yang potensial untuk dikembangkan adalah perikanan budidaya dikarenakan perikanan budidaya dapat direkayasa dengan penggunaan atau penerapan teknologi budidaya hasil dari riset atau penelitian yang terus berkembang.

Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara sebesar 59.617,25 Ton, bila dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 sebesar 45.242,99 Ton, artinya produksi tahun 2023 mengalami peningkatan produksi sebesar 14.374,26 Ton, hal ini dikarenakan melonjaknya hasil tangkapan beberapa jenis ikan seperti Ikan Kembung, Cumi, Gurita dan Kepiting rajungan yang dipicu oleh permintaan akan komoditas tersebut cukup besar khususnya untuk pasar ekspor yang telah mulai bergeliat serta permintaan pasar local yang cukup besar.

Dalam upaya meningkatkan produksi perikanan, ada 3 program utama yang dilaksanakan Dinas perikanan dan peternakan, yaitu:

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil. Bentuk kegiatan Pemberdayaan ini adalah pelatihan dan bimbingan teknis serta pendampingan usaha perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas nelayan kecil sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan kecil. Target dari peningkatan kapasitas nelayan yaitu jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya baik dari segi teknis maupun non teknis.
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Selain hal tersebut diatas, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dilakukan secara sistematis. Kerjasama Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2023 dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan tujuan melakukan Pengawasan terpadu dan gabungan di wilayah perairan Kabupaten Batu Bara sebanyak 2 kali operasi gabungan dan didapat sebanyak 4 armada kapal yang tertangkap melakukan penangkapan ikan di luar zonanya serta menggunakan alat tangkap terlarang.

Meningkatnya gairah industri perikanan tangkap ini dipicu dengan kegiatan pergantian alat tangkap ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Batu Bara yang dilaksanakan dan dilanjutkan dengan bantuan-bantuan alat tangkap ramah lingkungan, sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap seperti bantuan mesin, bantuan sampan, bantuan premi asuransi nelayan kepada nelayan-nelayan

tradisional. Kemudian dibukanya pasar ekspor pasca pandemic *covid-19* khususnya untuk komoditas unggulan Kabupaten Batu Bara seperti ikan Kembung, Cumi, Gurita, Rajungan, udang menyebabkan nelayan beralih dan fokus pada tangkapan ikan pada komoditas tersebut.

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Batu Bara cukup besar yaitu seluas 5.277 Ha yang terdiri dari Potensi Budidaya Air Payau 4.030 Ha dan Air Tawar sebesar 1.247 Ha dengan komoditas unggulan seperti Udang, Ikan Kerapu, Ikan Lele, Ikan Gurame, Ikan Nila, Mas, Patin, Nila Salin, Bandeng.

Akan tetapi potensi perikanan tangkap yang cukup besar tersebut belum dapat dikelola secara maksimal. Sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara masih belum memadai seperti Cold Storage berkapasitas besar, Pabrik Es Balok dan perlengkapan / teknologi penangkapan ikan untuk nelayan. Hal ini mengakibatkan kualitas mutu hasil tangkapan rendah dan dapat menimbulkan penurunan harga apabila hasil tangkapan melimpah dan tidak dapat ditampung oleh cold storage.

Sedangkan untuk pengelolaan budidaya ikan, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.

Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara sebagai upaya agar para pembudidaya ikan lebih berdaya dalam meningkatkan kemampuan budidaya dan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui usaha budidaya ikan yang dijalani. Selain itu, melalui kegiatan ini, Dinas Perikanan dan Peternakan juga memberikan fasilitasi secara terbuka kepada masyarakat umum yang memiliki ketertarikan untuk berusaha di bidang budidaya melalui pendampingan, pembinaan dan pelatihan serta fasilitasi sarana prasarana budidaya. Hasil dari kegiatan ini adalah sebanyak 20 Kelompok Pembudidaya Ikan yang dilatih berupa kegiatan pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik 2 Angkatan, Pelatihan Cara Budidaya Ikan dalam Ember (Budidamber) sebanyak 4 Angkatan dan Cara Pembuatan Pakan Ikan Mandiri sebanyak 2 Angkatan.

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kecil Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan usaha budidaya ikan tawar sesuai CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dengan harapan agar

pembudidaya ikan mengalami peningkatan mutu usaha budidaya yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara juga menyediakan benih ikan air tawar dan Air Payau yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan. Hasil dari kegiatan ini adalah 5 Paket bantuan benih ikan yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya ,yaitu:

A. Faktor yang menghambat dalam peningkatan produksi perikanan tangkap antara lain :

1. Efek dari melimpahnya hasil tangkapan berupa ikan kembung terjadi penurunan harga secara drastic akan produk ikan kembung,
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana berupa Cold Storage yang berkapasitas besar untuk menampung hasil tangkapan ikan yang melimpah sehingga menurunkan kualitas mutu ikan dan menurunkan harga jula ikan,
3. Adanya kelangkaan BBM bersubsidi bagi nelayan akibat adanya kenaikan harga BBM sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya biaya operasional nelayan khususnya nelayan tradisional,
4. Kurangnya operasi pengawasan sumberdaya ikan akan penggunaan alat tangkap terlarang diperairan Kabupaten Batu Bara oleh PSDKP Belawan dan Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang dapat menyebabkan kerusakan habitat ikan dan konflik nelayan.
5. Masih beroperasinya alat tangkap terlarang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di perairan Kabupaten Batu Bara.

B. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya baik budidaya air payau, air tawar dan air laut. Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Batu Bara seluas 5.277 Ha hanya baru 55 % saja dari potensi tersebut yang dimanfaatkan untuk lokasi usaha budidaya perikanan.
2. Kurangnya pasokan benur udang vaname, belum adanya unit

pembenihan/hatchery udang vaname di Kabupaten Batu Bara sehingga masih mengandalkan pasokan dari Kabupaten lain.

3. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).
4. Terjadinya kenaikan harga pakan ikan sehingga menambah biaya produksi.
5. Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya ikan dan udang yang diterapkan pembudidaya di Kabupaten batu Bara.
6. Fluktuasi harga ikan terutama harga ikan lele yang mengakibatkan pembudidaya berhenti usaha dan beralih ke komoditas budidaya yang lain.

Dari beberapa faktor penghambat yang dihadapi di lapangan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan untuk periode selanjutnya:

1. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan serta melakukan pendampingan dalam penerapan teknologi baru;
2. Memfasilitasi kemudahan untuk mendapatkan bibit unggul;
3. Memberikan layanan bagi pelaku utama usaha perikanan untuk mendapat bahan bakar minyak bersubsidi dengan memberikan rekomendasi pembelian;

Pencapaian sasaran ini merupakan tanggung jawab 2 (dua) perangkat daerah utama, yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian, melakukan pengendalian dan penanggulangan hama pertanian, melakukan penyuluhan pertanian, kemudian Dinas Perikanan dan Peternakan dengan program pengelolaan perikanan tangkap perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil ikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai dinas pendukung juga telah memberikan kontribusi yang besar dengan membangun irigasi sepanjang 127.636 m hingga tahun 2023, cakupan irigasi ini melayani areal fungsional irigasi seluas 2.763 Ha. Yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian di Batu Bara.

Untuk peningkatan berkelanjutan pada indikator ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah membuat beberapa inovasi yang telah diikutsertakan dalam lomba inovasi tingkat Kabupaten tahun 2023, inovasi tersebut antara lain yaitu, SIPAJI BARA dan Pembibit Bawang Merah (dinas Pertanian dan

Perkebunan), SIIKAN BARA dan Pengasapan Ikan Kedukan sebagai Mata Pencarian Alternatif (dinas Perikanan).

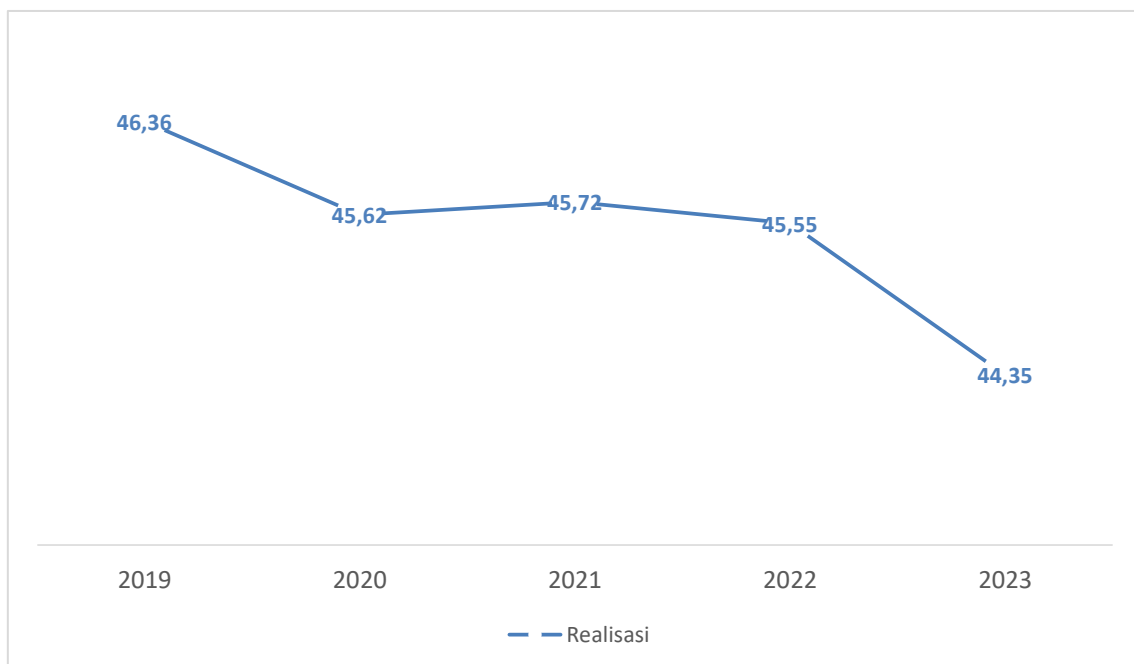
Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	49,07	45,55	92,83	46,00	44,35	96,41

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian diukur dengan indikator angka Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB. Sejak tahun 2019 pertumbuhan pada sektor ini terus mengalami trend yang menurun.

Grafik 3.4.
Perkembangan Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023



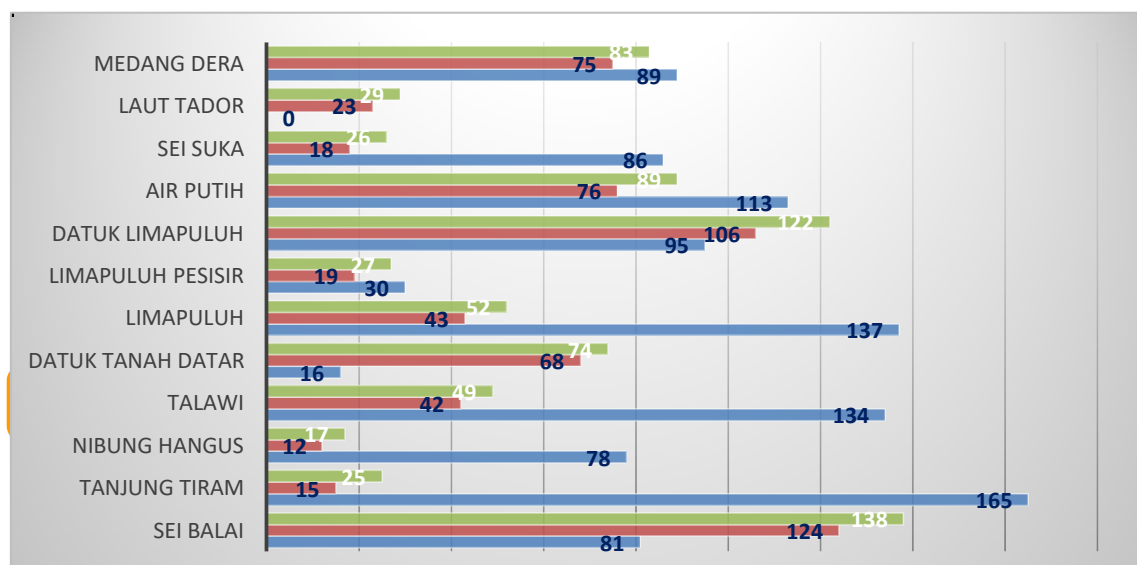
Dari grafik diatas dapat diketahui pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2023 mengalami penurunan 1,2% jika dibandingkan tahun 2022 dimana Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 44,35%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 49,56%, pencapaian tahun 2023 sebesar 44,35% masih sangat jauh, sangat diperlukan upaya yang massif agar dapat menaikkan pertumbuhan indikator ini secara signifikan di tahun mendatang.

Pengukuran capaian indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS. Capaian kinerja nyata pada indikator ini sebesar 96,41% dengan kategori **sangat tinggi**, diperoleh dari target perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 46% dengan realisasi sebesar 44,35%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu bara di tahun 2003 tercatat sebesar 4,08%, dengan kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 44,35 % terhadap PDB. Walaupun terjadi penurunan kontribusi, secara nilai sektor ini terus mengalami kenaikan nilai setiap tahunnya,yaitu 11,76 Miliar pada tahun 2023, untuk nilai Laju PDRB terhadap harga konstan 2010 indutri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 4,19%. Sedangkan pada sisi penyerapan tenaga kerja, sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 12.498 orang atau sekitar 18,48% dari total tenaga kerja sebesar 67.644 orang.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Batu Bara, Pada tahun 2023 jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Batu Bara berjumlah 31 perusahaan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Batu Bara. Sedangkan jumlah industri kecil dan kerajinan rumah tangga pada tahun 2022 berjumlah 731 unit, terjadi penambahan sebanyak 110 unit.

Grafik 3.5.
Perbandingan Industri Kecil Dan Rumah Tangga
Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 dan 2023



Dari grafik diatas, seluruh kecamatan di Kabupaten Batu Bara mengalami peningkatan jumlah industri kecil dan kerajinan tangan, yang terbesar terdapat di kecamatan Datuk Lima Puluh sebanyak 16 unit disusul Kecamatan Air Putih sebanyak 13 unit.

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu tumpuan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Selain didukung dengan bahan baku yang cukup memadai dan tenaga kerja yang cukup potensial, berbagai upaya juga dilakukan untuk melakukan perbaikan, terutama pada industri menengah, industri kecil dan rumah tangga. Terdapat 2 (dua) Perangkat daerah utama yang bertanggungjawab terhadap peningkatan pertumbuhan industri, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan dengan Program Hubungan Industrial, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro, Program Pengembangan UMKM.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dilakukan terdapat beberapa serta permasalahan di lapangan yang menjadi prioritas untuk segera diatasi, yaitu:

1. Kapasitas produksi industri kecil menengah masih belum optimal.
2. Pengembangan kualitas produk IKM dan kemasan yang belum maksimal.
3. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah.
4. Lemahnya penguasaan desain produk unggulan daerah. Membanjirnya produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif yang mengakibatkan lemahnya daya saing produk.
5. Terbatasnya kualitas SDM pelaku usaha industri.
6. Lemahnya kemampuan pelaku usaha industri dan perdagangan dalam

mengakses permodalan

Dari beberapa permasalahan diatas, beberapa solusi alternatif telah dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan di tahun mendatang, antara lain:

1. Membangun aplikasi “**ediskopukmb**” yang dimanfaatkan untuk memasarkan produknya secara online;
2. Memfasilitasi bantuan alat produksi dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas produk;
3. Melakukan pendampingan dan pembinaan dari sisi akses permodalan dan peningkatan kompetensi SDM;

Sasaran meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,30	17,82	97,19	19,96	18,37	92,03

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan.

Sasaran meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan, memiliki indikator:

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB

Pencapaian kinerja pada indikator ini diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Target PDRB Sektor Perdagangan}} \times 100\% \\ &= \frac{19,96}{18,37} \times 100\% \end{aligned}$$

= 92,03%

Indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan capaian kinerja sebesar 92,03%, termasuk kategori **sangat tinggi**. yang berasal dari perhitungan target sebesar 19,96% dan dengan realisasi sebesar 18,37%.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara yang dituangkan dalam Barada 2024, sektor perdagangan besar dan eceran, terus mengalami peningkatan selama periode 2019-2023, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 dan Kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 18,37. Berikut dapat dilihat dari tabel dibawah peningkatan yang terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran.

Tabel 3.17

Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Dari Tahun 2019-2023 Di Kabupaten Batu Bara

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Perdagangan besar dan eceran	17,48	17,96	17,89	17,82	18,37
Peningkatan	0,19	0,73	-	-	0,55
Penurunan	-	-	0,07	0,07	-

Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2023, sektor perdagangan juga tumbuh positif sebesar 3,09% pada triwulan IV. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik dan penjualan sepeda motor. sektor ini mengalami peningkatan sebesar 0,55 dibandingkan dengan tahun 2022. Tetapi pencapaian sebesar 18,37% belum memenuhi target akhir RPJMD sebesar 20,96%, pencapaian tahun 2023 masih 2,59% lagi.

Posisi strategis Kabupaten Batu Bara yang ditunjang dengan ketersediaan aksesibilitas yang baik (pelabuhan, jalan trans Sumatera) berimplikasi pada berkembangnya perdagangan, Sektor Perdagangan menjadi satu diantara sektor unggulan di Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 terdapat 17.285 Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan telah menyerap 26.442 tenaga kerja.

Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan sebagai perangkat daerah utama dalam meningkatkan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB antara lain dengan melakukan kebijakan program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Program Pengembangan Ekspor. Melakukan monitoring dan pemantauan harga barang pokok kebutuhan masyarakat, Melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga barang pokok dan barang strategis kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, faktor pendorong lainnya yang dimanfaatkan Dinas Koperasi dan UMKM adalah antusiasme yang tinggi dari pelaku IKM dan inisiatif dari pengelola situs e-commerce dalam memberdayakan pemasaran produk IKM dan UKM secara online.

Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja untuk indikator ini antara lain adalah:

1. belum maksimalnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan khususnya pasar rakyat.
2. tingginya fluktuasi harga barang pokok dan barang penting kebutuhan masyarakat yang mempengaruhi inflasi daerah dan daya beli masyarakat.
3. belum optimalnya pelaksanaan peningkatan tertib niaga dan tertib ukur karena terbatasnya anggaran operasional pelayanan dan SDM penara dan pengawas penara alat ukur takar timbang dan perlengkapannya.

Adapun Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

1. Merevitalisasi sarana dan prasarana pasar tradisional.
2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan pasar tradisional.
3. Melakukan monitoring dan pemantauan harga barang pokok kebutuhan masyarakat.
4. Melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga barang pokok dan barang strategis kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur serta pengawasan kemetrolagian dalam upaya peningkatan tertib niaga dan tertib ukur.
6. Memfasilitasi UMKM dalam peningkatan produksi dan pemasaran melalui bantuan alat produksi dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.

7. Mendorong dan melakukan pendampingan pemasaran produk UMKM secara Online.

Sasaran Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,00	73,5	103,52	75,00	72,94	97,25

Sasaran Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja, Memiliki 1 (satu) Indikator sebagai berikut:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pencapaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 97,25% atau kategori **sangat tinggi**. Hasil pengukurannya didapat dari Realisasi sebesar 72,94% dibagi dengan target sebesar 75%.

TPAK merupakan indikator untuk menghitung besarnya tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Mantra (2003) menjelaskan bahwa angka TPAK dapat digunakan untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan (menganggur).

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Keadaan	Jumlah
1	Jlh Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	308.104
2	Jlh Angkatan Kerja	224.741
3	Bekerja	211.537
4	Pengangguran	13.204
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,88

Dari data diatas dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar

73,5% dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 sebanyak 224.741 dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Dari jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut, sebesar 211.537 orang bekerja dan 13.204 masih menganggur. Menurut data BPS 2023 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Batu Bara sebesar 5,88%. berikut ini tabel partisipasi angkatan kerja dari tahun 2020 sampai 2023:

Tabel 3.18.
Tingkat Partisipasi Angkata Kerja Tahun 2020-2023

No	Tahun	TPAK
1	2020	69,10
2	2021	70,0
3	2022	73,5
4	2023	72,94

Jika TPAK Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 sebesar 72,94% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 72 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu..

Adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan timbulnya masalah pengangguran. Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja disebut dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat pengangguran terbuka terdiri dari empat komponen, yaitu:

1. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi munculnya pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu yang paling pokok adalah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan memberikan peluang kesempatan kerja baru atau dengan kata lain memberikan kesempatan industri untuk meningkatkan output, peningkatan output tentunya akan meningkatkan penggunaan faktor produksi.

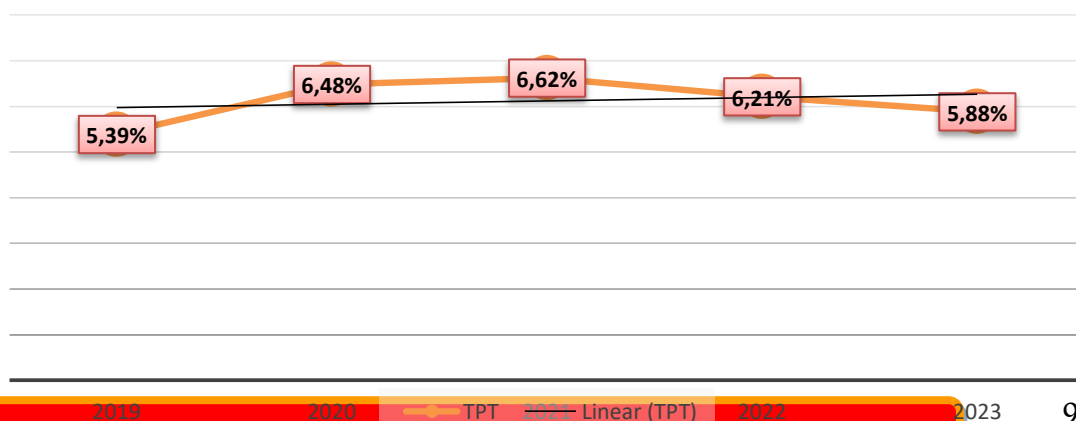
Sebagai perbandingan perkembangan TPT di Batu Bara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.19
Rincian Tingkat Pengangguran Terbuka
Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023

Uraian	TPT (%/Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi	5,39	6,48	6,62	6,21	5,88
Meningkat	-	1,09	0,14	-	-
Menurun	1,51	0,39	-	0,41	0,33

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Batu Bara mengalami penurunan sampai pada tahun 2023 sebesar 0,33% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Grafik dibawah ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023.

Grafik. 3.6
Perkembangan tingkat pengangguran terbuka
Di Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023



Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan variabel yang memberikan pengaruh besar terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah struktur umur, upah, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja antara lain:

- a. Jumlah Penduduk yang masih bersekolah
Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang bersekolah, maka jumlah angkatan kerja semakin kecil yang selanjutnya berdampak pada TPAK yang juga semakin kecil. Penyediaan fasilitas pendidikan, kondisi dan penghasilan keluarga memberikan pengaruh pada jumlah penduduk yang memutuskan untuk bersekolah.
- b. Jumlah Penduduk yang mengurus rumah tangga
Angka TPAK akan semakin kecil jumlahnya ketika semakin banyak tiap-tiap anggota keluarga yang mengurus rumah tangga.
- c. Umur
Penduduk laki-laki terutama yang berumur 25-55 tahun umumnya dituntut menafkahi keluarganya sehingga TPAK relatif besar. Sedangkan penduduk yang berusia lebih dari 55 tahun cenderung menurunkan TPAK karena pada usia ini produktivitas kerja menurun dari adanya keputusan untuk pensiun.
- d. Tingkat Pendidikan
Semakin tinggi kualitas atau jenjang pendidikan individu, maka akan membuat kesempatan bekerja semakin luas. Sehingga pada akhirnya TPAK akan cenderung mengalami kenaikan.
- e. Upah
Semakin tinggi upah di pasar tenaga kerja, semakin banyak keputusan anggota yang tertarik masuk pasar kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kemampuan angkatan kerja yang tersedia. Adapun upaya-upaya tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, meliputi:
 - a. Pelatihan dan kompetensi kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelatihan, meningkatkan jumlah lulusan pelatihan, meningkatkan lembaga latihan yang terakreditasi.
 - b. Mengevaluasi tingkat produktivitas tenaga kerja.
2. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja, meliputi:
 - a. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak industrial dalam bidang perjanjian kerjasama, pendirian lembaga kerjasama bipartite diperusahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja, Melakukan pembinaan terhadap pihak industrial (perusahaan) menyangkut jaminan sosial tenaga kerja.

Sasaran Meningkatnya inovasi daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40 (Inovatif)	42,99 (Inovatif)	107,48	45 (Inovatif)	53,17 (Inovatif)	118,15

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing daerah.

Pengukurannya indeks inovasi daerah mengacu pada 36 indikator. Jumlah ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu 16 indikator merujuk pada satuan pemerintah daerah, serta 20 indikator satuan inovasi. Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah, seperti adanya payung

hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya.

Sasaran Indeks inovasi daerah memiliki 1 (satu) indikator dengan analisa sebagai berikut:

Indeks inovasi daerah

Pencapaian kinerja pada indikator Indeks Inovasi Daerah diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Indeks Inovasi Daerah}}{\text{Target Indeks Inovasi Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{53,17}{45} \times 100\% \\ &= 118,15\% \end{aligned}$$

Persentase Capaian kinerja indikator Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2023 sebesar **118,15%** termasuk kategori **sangat tinggi**, berasal dari perhitungan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Bupati sebesar 45 (Inovatif) dan dengan capaian kinerja nyata sebesar 53,17 Poin. Pencapaian ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 42,99 poin mengalami peningkatan sebesar 10,18 poin, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja tahun 2023 telah melebihi target sebesar 13,17 Point.

Pada tahun 2023, jumlah inovasi yang terhimpun di kabupaten Batu Bara sebanyak 23 (dua puluh tiga) inovasi, akan tetapi yang memiliki bobot kematangan tinggi hanya 13 (tiga belas) inovasi yang diikutsertakan dalam Penghargaan Pemerintah Terinovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2023 karena memiliki bobot kematangan Inovasi yang tinggi dan mendongkrak kenaikan nilai IID Kabupaten Batu Bara sehingga Kabupaten Batu Bara berhasil masuk 5 (lima) besar nominasi kategori Daerah Perbatasan Terinovatif dan setelah dilaksanakan verifikasi oleh Dewan Juri, Kabupaten Batu Bara menduduki peringkat 3 (tiga) Nasional. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.20.

Jenis-Jenis Inovasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jenis Inovasi
1	Dinas Perikanan	1. SIIKAN BARA
2	Dukcapil	1. Dukcapil SIGAP (Siap Gerak Cepat) 2. Dokter KK Go Digital (dokumen terbit karena kelahiran) 3. Dukcapil hadir di Desa
3	Dinas Koperasi UMKM	1. Rumah Kemasan Batu Bara Untuk Tingkatkan Penjualan dan Perbaikan Ekonomi UMKM 2. Rumah Batik Batu Bara sebagai wadah pengembangan wastra 3. Aplikasi E-DISKOPUKM Batu Bara Sebagai Platform Pelayanan Pengembangan Perkoperasian dan UMKM
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	GEMA PENTING (Gerakan Masyarakat Penurunan Stunting)
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
6	RSUD Batu Bara	Portal Informasi & Pendaftaran Untuk Rawat Jalan Online (POIN DATUK RAJO)
7	Dinas Pendidikan	Digitalisasi Pengelolaan Dana BOS melalui Aplikasi Simpel BOS
8	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	SIBADA (Sistem Basis Data Inovasi Daerah)
9	Sekretariat Daerah	SI SUKMA
10	Kecamatan Sei Suka	Eco Enzyme
11	Kecamatan Datuk Lima Puluh	Pembuatan Kain Tenun Songket Batu Bara
12	Kecamatan Lima Puluh	Standar Pelayanan Publik Kecamatan Lima Puluh
13	Kecamatan Datuk Tanah Datar	Pewarnaan Kain Limbah Kulit Kelapa

Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 telah mengikuti perlombaan inovasi tingkat Nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Koperasi dan UKM memperoleh Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dengan judul inovasi Rumah Kemasan Kabupaten Batu Bara Berbasis Digital untuk Tingkatkan Penjualan dan Perbaikan Ekonomi UMKM di Batu Bara.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 disampaikan nilai IID Kabupaten Batu Bara adalah sebesar 53,17 yang meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 42,99. Nilai ini sudah melampaui nilai IID Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi sebesar 44,77.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

N	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
---	-----------	--------	------------	------------

o			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,30	67,55	100,37	69,71	72,63	104,19

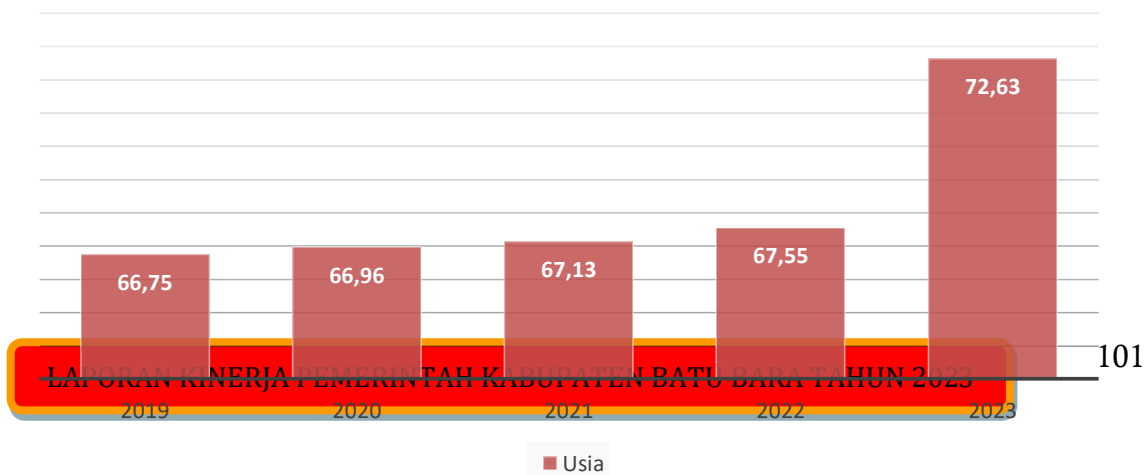
Angka Harapan Hidup

Peningkatan harapan hidup masyarakat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH menunjukkan rata-rata harapan lama hidup manusia (umur) yang dihitung sejak lahir. Tingkat capaian peningkatan harapan hidup diukur dari angka realisasi dibagi dengan angka yang menjadi target. Kemudian untuk mendapatkan skor dalam satuan persen, hasilnya dikalikan 100%. Dalam hal ini, target capaian AHH tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Bupati Batu Bara adalah 69,71. Realisasi Tahun 2023 sebesar 72,63 tahun, persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 104,19%. Skor pencapaian tersebut menunjukkan bahwa sasaran pembangunan untuk meningkatkan harapan hidup ini sesuai target akhir RPJMD sebesar 71 tahun sudah tercapai, termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Berdasarkan data BPS, dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2023, Batu Bara telah berhasil meningkatkan angka harapan hidup saat lahir sebesar 2,92 tahun. Berikut grafik angka harapan hidup Kabupaten Batu Bara periode 2019-2023:

Grafik. 3.7.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Batu Bara Periode 2019-2023



Walaupun perkembangan AHH Kabupaten Batu Bara terus meningkat, jika dibandingkan dengan kota Medan masih tertinggal jauh yaitu 9,98 tahun. Hal ini menunjukkan kualitas kesehatan masih harus ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Skema kebijakan utama yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan harapan hidup yang diusung oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas utama dalam peningkatan AHH telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terdiri dari peningkatan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas layanan kesehatan serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk berperilaku sehat. Untuk kebijakan lainnya, upaya yang dilakukan dengan melakukan pengembangan tenaga kesehatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Selain itu dukungan dan peran serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Rumah Sakit Umum Daerah dan 14 Unit Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan akses kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dilakukan dengan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat di 76 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Layanan yang dilakukan termasuk untuk Ibu dan Anak, KB, pencegahan penyakit, promosi kesehatan gizi, dan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan rujukan diwujudkan dalam layanan kesehatan di RS umum daerah Kabupaten Batu Bara. Selain itu, upaya meningkatkan akses kesehatan juga difokuskan untuk mendorong akreditasi beberapa Puskesmas, dari 14 Puskesmas yang ada 8 (delapan) puskesmas sudah terakreditasi madya dan 6 (enam) Puskesmas terakreditasi Utama. Selain itu, jumlah kepemilikan JKN bagi penduduk (sumber anggaran APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN) juga mengalami peningkatan, sebanyak 429.814 dari 430.533 jiwa telah memiliki JKN. Proses pendukung yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial

Upaya meningkatkan kualitas kesehatan, selain diberikan kepada ibu dan anak, juga dilakukan pembentukan desa/kelurahan UCI, desa/kelurahan stop BABS, juga berfokus pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit baik menular maupun tidak menular yang juga menjadi faktor penting peningkatan AHH. diantaranya yang paling pokok adalah TBC, malaria dan BDB. Upaya promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, pembentukan bank sampah terus di galakkan sebagai upaya mencapai kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, pelayanan KB dengan pembinaan kampung KB, pembinaan KB bagi Pasangan Usia Subur, serta melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi (kespro) kepada remaja usia 15-24 tahun.

Dalam menyelenggarakan layananannya, ada beberapa faktor penghambat yang ditemui di lapangan. Permasalahan tersebut mencakup aspek SDM Kesehatan; keterbatasan sarana prasarana pendukung; data dan informasi; akreditasi pusat kesehatan; aksesibilitas dan kesadaran masyarakat; meningkatnya kasus stunting; masih kuatnya kepercayaan sebagian masyarakat dengan dukun/parajis; Belum adanya kerjasama pelaporan cakupan KB dengan rumah sakit swasta; serta faktor eksternal lainnya.

Masyarakat sebagai sasaran layanan kesehatan juga muncul sebagai satu aspek penghambat. Persoalannya mencakup beberapa isu kesehatan, diantaranya :

1. Faktor Sosial Budaya di kelompok masyarakat tertentu, termasuk peran Perempuan atau Ibu hamil dalam pengambilan keputusan yang masih rendah serta masih kuatnya kepercayaan sebagian masyarakat dengan dukun sehingga persalinan tidak di fasilitas kesehatan.
2. Tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memberikan layanan persalinan bekerjasama dengan BPJS, sehingga tidak dapat melayani peserta JKN.
3. Faktor Sosial Budaya di kelompok masyarakat tertentu, seperti larangan membawa bayi keluar rumah sebelum 40 hari, sehingga membatasi kontak neonatal dengan petugas kesehatan.
4. Masih Banyak yang Mempercayai jika Stunting Penyakit Keturunan Genetik bahwa
5. kondisi tubuh anak yang pendek sering dianggap hasil turunan dari para

orangtuanya. Padahal, anak mereka yang tubuh tingginya pendek bisa terindikasi bukan karena faktor genetika semata, tetapi menandakan kalau dia mengalami kekurangan gizi (dan mungkin stunting). Faktanya, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang nilainya paling kecil jika kita membandingkan hal tersebut ke hal-hal lain seperti perilaku hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan hingga ke pelayanan kesehatan.

Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata lama sekolah	Indeks	8,54	8,26	96,72	8,60	8,50	98,85

Mewujudkan Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Batu Bara secara Global. indikatornya berupa Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS). Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023, dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

Rata-rata lama sekolah

Target Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara tahun 2023, ditunjukan dari ARLS dengan target 8,60 tahun, tidak dapat terlampaui. Capaian indikator adalah 98,84% dengan predikat **sangat tinggi**, berasal dari perhitungan realisasi sebesar 8,50 tahun dibagi target sebesar 8,60 dikali 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 9 tahun, capaian tahun 2023 masih kurang sebesar 0,50 tahun. Dan jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 9,82 tahun, rata-rata lama sekolah Pemkab. Batu Bara juga masih tertinggal 1,32 Tahun.

Kemudahan Akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, seperti juga indikator pendidikan lain yang penting seperti angka melek huruf. Hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk

memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.

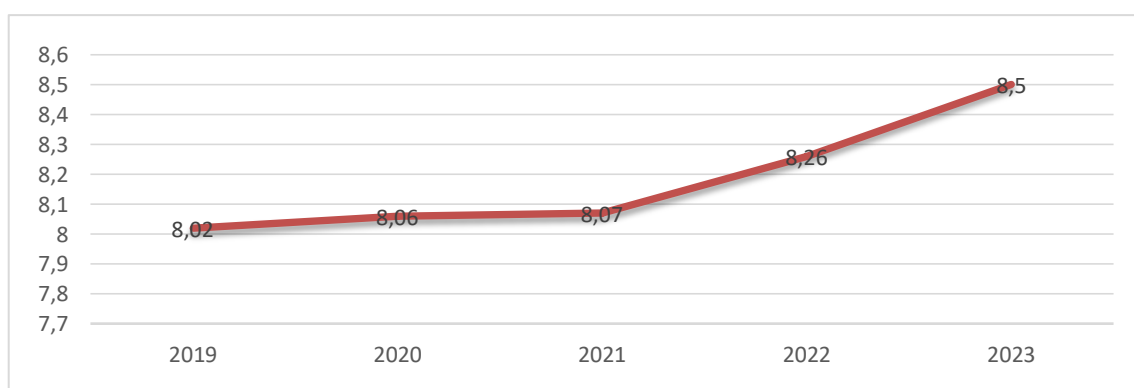
Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan indikator rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Batu Bara tumbuh 0,24 selama periode 2022 hingga 2023. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Batu Bara yang lebih baik. Pada tahun 2022, lama sekolah penduduk Batu Bara usia 25 tahun ke atas secara rata-rata mencapai 8,26 tahun, pada tahun 2023, lama sekolah penduduk Batu Bara usia 25 tahun ke atas secara rata-rata mencapai 8,50 tahun, atau telah menamatkan pendidikan hingga bangku kelas II atau kelas VIII tingkat SLTP.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Batu Bara ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Batu Bara semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Batu Bara periode 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.8.

**Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Batu Bara
Periode 2019-2023**



Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat memiliki skema intervensi yang sangat komprehensif. Selain unsur manajemen, terdapat beberapa aspek yang memiliki kontribusi terhadap kualitas pendidikan. Empat diantaranya yang paling utama dan menjadi tugas Dinas Pendidikan adalah Pengelolaan Pendidikan SD, SMP, Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Unsur pendukung lainnya yang tidak kalah penting adalah program peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, pengelolaan museum. Terdapat juga upaya pendukung yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dalam mencapai pengembangan budaya literasi dengan program pembinaan kualitas perpustakaan, pembinaan perpustakaan ini dilakukan hampir diseluruh sekolah tingkat pertama dan disetiap kelurahan. Selain itu untuk mempermudah masyarakat mendapatkan bahan bacaan, terdapat perpustakaan keliling dan perpustakaan online yang dengan mudah dapat diakses masyarakat.

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks desa membangun	Indeks	0,7146	0,6858	95,97	0,7073	0,6968	98,52%

Desa secara esensial merupakan Pemerintahan Otonomi Tingkat 4, tingkatan paling dasar (Pondasi) dari 4 lapis Struktur NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), sekaligus masyarakat Desa adalah Entitas Komunitas Bangsa Nusantara yang terkecil (Inti). Maka harus dapat dipastikan penyusunan IDM berdasarkan substansi berbagai regulasi dalam kerangka pelaksanaan kebijakan konsep pembangunan nasional yang paripurna dalam semua aspek yang telah ditetapkan secara nasional. Selain hal tersebut, juga harus dapat dipastikan IDM telah sejalan dengan strategi pencapaian sasaran strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara berkelanjutan.

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 pada sasaran meningkatnya

kualitas hidup masyarakat, dapat dilihat pada indikator di bawah ini:

Indeks desa membangun

Indeks Desa Membangun disusun dengan memperhatikan ketersediaan data yang bersumber dari Potensi Desa, yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Artinya IDM dapat digunakan untuk mengukur Pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan Kapasitas desa. Kenapa demikian? Karena IDM akan dijadikan sebagai embrio lahirnya Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di tahun berikutnya. Selain itu, IDM dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk Menyusun kebijakan pembangunan ke depannya dalam hal ini dapat berupa peraturan bupati atau keputusan bupati tentang pengelolaan dana yang ada di desa demi kemajuan Desa. Fungsi yang lain dari IDM dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran Desa yaitu dapat dijadikan sebagai bahan dalam Musrenbang Desa untuk Menyusun rencana kegiatan di tahun berikutnya. Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Klasifikasi Status Desa dari hasil perhitungan IDM ditetapkan dengan ambang

batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal: $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang: $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju: $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri: $IDM > 0,8155$

Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Upaya dalam mencapai sasaran ini merupakan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai perangkat daerah utama. Dengan

beberapa program yang dilakukan seperti meningkatkan kualitas kerjasama desa, meningkatkan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa, meningkatkan kualitas lembaga desa. Selain itu terdapat 2 (dua) perangkat daerah pendukung, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan dengan program peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan upaya peningkatan pencatatan sipil, peningkatan kualitas pengelolaan informasi kependudukan.

Persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,52% termasuk kategori **sangat tinggi**, yang berasal dari perhitungan target 0,7073 dengan realisasi 0,6968. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,7432 pencapaian ini masih kurang sebesar 0,0464. Capaian keberhasilan ini didukung komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan peran aktif Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa, seperti pelaksanaan lomba desa terbaik serta melakukan pembinaan desa percontohan.

Secara Keseluruhan untuk target Indeks Desa Membangun (IDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 yaitu 0,7073 dengan realisasi 0,6968. Dari segi angka tidak mencapai target begitu juga dari segi status desa belum tercapai yaitu Desa Maju. Perbandingan data pencapaian IDM untuk tahun 2022 dan 2023 digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.21

Perbandingan IDM Tahun 2022 dan 2023 Kab. Batu Bara

Status Desa	Tahun 2022	Tahun 2023
	(Jlh Desa)	(Jlh Desa)
Sangat Tertinggal	0	0
Tertinggal	4	1
Berkembang	96	86
Maju	30	38
Mandiri	11	16
Jumlah	141	141

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat beberapa perubahan status desa. Untuk desa tertinggal terdapat penurunan

sebanyak 3 desa yang naik status menjadi desa berkembang. Untuk desa berkembang terdapat penurunan sebanyak 10 desa yang naik status menjadi desa maju. Untuk desa maju terdapat penambahan sebanyak 8 desa dan untuk desa mandiri terdapat penambahan sebanyak 5 desa.

Hal ini menunjukkan bahwa rata rata desa di Batu Bara berdasarkan data IDM adalah desa berkembang (86 desa). Status berkembang berarti kinerja Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sudah terpenuhi namun belum maksimal. Artinya adalah seluruh fasilitas umum, fasilitas Kesehatan, fasilitas perekonomian, alat peringatan dini bencana dan proses pencegahan bencana air, tanah dan udara telah terpenuhi dan berjalan dengan baik namun belum mencakup semuanya. Sehingga diperlukan peran dari Pemerintah desa melalui dana desa, pemerintah kabupaten melalui APBD nya dan Propinsi serta pusat untuk dapat memenuhi semua cakupan dalam pembangunan desa sehingga dapat meningkat status desa menjadi desa maju dan mandiri.

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara adalah:

1. Kurangnya sumber daya dalam melakukan pengukuran IDM di desa karena Pendamping Lokal Desa masih menaungi 3 sampai 4 desa sehingga data yang didapat dikhawatirkan kurang maksimal.
2. Adanya beberapa indikator IDM sulit tercapai misalnya pelaksanaan kegiatan Gotong Royong, walaupun begitu indikator ini dapat ditutupi dari nilai indikator yang lainnya.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara :

1. Adanya Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa bersama tenaga ahli P3MD dalam melakukan pengisian data Quesioner yang merupakan dasar untuk menghitung angka IDM.
2. Penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran sehingga mendukung angka untuk indikator dalam pengisian quesioner IDM dari tiga indikator yaitu IKE, IKS dan IKL. Indeks Ketahanan Ekonomi melalui pengembangan lembaga ekonominya (BUMDES). Bahkan di Kecamatan Lima Puluh sudah terbentuk Bumdes Bersama yang merupakan kerjasama dari 11 Desa. Kesepakatan bersama ini tertuang dalam Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang

Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Lima Puluh Berkarya Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Masa Bhakti 2020 – 2025. Dari segi Indeks Ketahanan Sosial sudah dilaksanakan kegiatan gotong royong di beberapa desa yang dilaksanakan Dinas PMD, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong tersebut, dilakukan pembersihan terhadap jalan – jalan protokol desa, drainase, halaman rumah penduduk dan lokasi tumpukan sampah. Kegiatan gotong royong dilaksanakan sebagai upaya menciptakan desa yang bersih dan menghidupkan kembali semangat kebersamaan bergotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung capaian kinerja indikator IDM adalah :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa / Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa / Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat / kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks gini	Persen	0,257	0,243	105,45	0,257	0,243	93,75

Menurutnya tingkat ketimpangan pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini bernilai nol, jika pendapatan menyebar secara merata dan mendekati 1 jika distribusi pendapatan tidak menyebar secara merata.

Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi memiliki 1 (satu) indikator, yaitu Indeks gini, yang penjelasannya dapat disimak berikut ini:

Indeks Gini

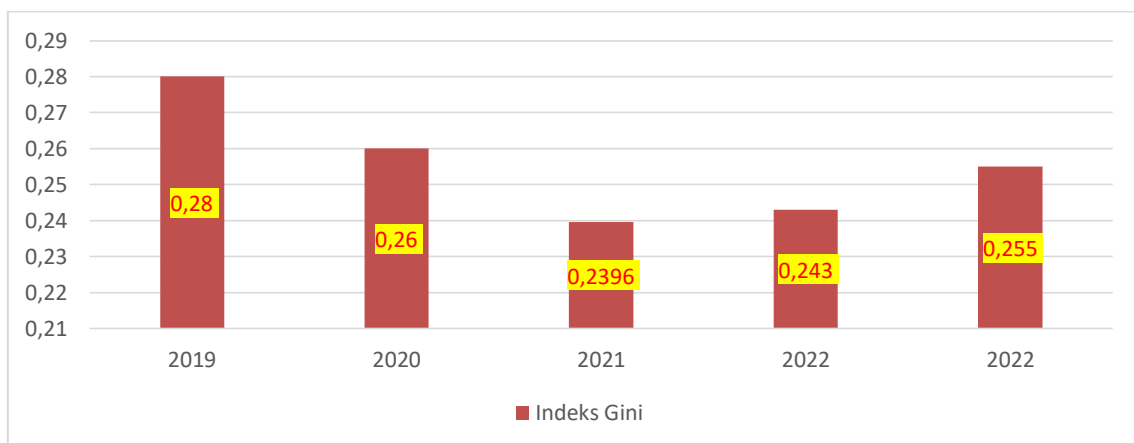
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi menggunakan

indikator Indeks gini. Indeks Gini atau Indeks Ketimpangan Pendapatan menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Batu Bara menargetkan Indeks Gini pada Tahun 2023 sebesar 0,240.

Target 0,240 merupakan target wajar yang dipilih berdasarkan analisis pertimbangan dan berdasarkan hasil proyeksi Bappeda dengan mempertimbangkan trend angka gini rasio pada tahun sebelumnya, serta kondisi pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Kabupaten Batu Bara.

Grafik 3.9

Trend Indeks Gini Kabupaten Batu Bara Periode 2019-2023



Realisasi indeks gini pada tahun 2023 naik menjadi 0,255. Nilai ini lebih tinggi 0,012 poin dibandingkan realisasi tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,254, terdapat selisih 0,001 poin. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan sudah semakin merata. Jika melihat gini rasio provinsi Sumatera Utara, gini rasio kabupaten Batu Bara masih lebih rendah 0,054 point.

Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja serta penurunan kemiskinan. Selain itu terdapat aspek pendukung antara lain, peningkatan produktivitas koperasi,

peningkatan usaha mikro dan kecil.

Untuk pencapaian yang lebih baik terhadap indikator ini, mensyaratkan keterlibatan beberapa Perangkat Daerah yang memiliki tugas terkait. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Ketenagakerjaan, perindustrian dan Perdagangan mengambil peranan paling pokok dan paling besar.

Pada proses pelaksanaannya, Dinas Koperasi dan UMKM bertanggungjawab terhadap pengembangan koperasi dan pengembangan usaha kecil dan usaha menengah, yang meliputi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan kesejahteraan anggota UMKM, meningkatkan level skala usaha mikro ke usaha kecil dan meningkatkan pertumbuhan usaha baru baik usaha dilevel mikro, kecil dan menengah.

Langkah besar yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM adalah dengan melakukan terobosan mendirikan rumah kemasan, sehingga produk para pelaku UMKM menjadi layak untuk dipasarkan di beberapa mini market yang terdapat di Batu Bara dan Simalungun. Selain rumah kemasan ada juga rumah batik bagi pengrajin batik di Batu Bara.

Dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, Dinas Ketenagakerjaan, perindustrian dan Perdagangan melaksanakan beberapa program antara lain, peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja, peningkatan kualitas pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kualitas penempatan tenaga kerja.

Kontribusi dan dukungan juga dilaksanakan oleh 12 Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pembinaan Bumdes.

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel 3.22

Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023

Kabupaten/Kota		Tahun				
Regency/Municipality		2018	2020	2021	2022	
[1]		1	2	3	4	5
	SUMATERA UTARA	0,32	0,32	0.3145	0.3120	0,2190
01	Nias	0,27	0,25	0.2452	0.2750	0,2190
02	Mandailing Natal	0,26	0,25	0.2403	0.2440	0,2190
03	Tapanuli Selatan	0,25	0,20	0.2564	0.2090	0,2190

04	Tapanuli Tengah	0,31	0,33	0.2917	0.2330	0,2190
05	Tapanuli Utara	0,31	0,29	0.2766	0.2420	0,2190
06	Toba Samosir	0,28	0,29	0.2719	0.3050	0,2190
07	Labuhan Batu	0,28	0,27	0.2564	0.2780	0,2190
08	Asahan	0,28	0,26	0.2441	0.2550	0,2190
09	Simalungun	0,27	0,29	0.2641	0.2620	0,2190
10	Dairi	0,29	0,27	0.2268	0.2210	0,2190
11	Karo	0,26	0,27	0.2327	0.2360	0,2190
12	Deli Serdang	0,27	0,31	0.2628	0.2700	0,2190
13	Langkat	0,27	0,24	0.2381	0.2600	0,2190
14	Nias Selatan	0,32	0,29	0.2411	0.2230	0,2190
15	Humbang Hasundutan	0,29	0,25	0.3043	0.2580	0,2190
16	Pakpak Bharat	0,28	0,25	0.2421	0.2740	0,2190
17	Samosir	0,30	0,32	0.2735	0.2980	0,2190
18	Serdang Bedagai	0,26	0,26	0.2287	0.2400	0,2190
19	Batubara	0,28	0,26	0.2396	0.2430	0,2190
20	Padang Lawas Utara	0,27	0,23	0.2547	0.2450	0,2190
21	Padang Lawas	0,23	0,27	0.2525	0.2270	0,2190
22	Labuhan Batu Selatan	0,25	0,19	0.2317	0.2470	0,2190
23	Labuhan Batu Utara	0,27	0,26	0.2431	0.2760	0,2190
24	Nias Utara	0,28	0,25	0.2359	0.2390	0,2190
25	Nias Barat	0,26	0,23	0.2238	0.2100	0,2190
71	Sibolga	0,27	0,29	0.2764	0.3460	0,2190
72	Tanjung Balai	0,27	0,27	0.2477	0.2450	0,2190
73	Pematang Siantar	0,33	0,34	0.3076	0.3210	0,2190
74	Tebing Tinggi	0,32	0,33	0.3440	0.3340	0,2190
75	Medan	0,35	0,32	0.4020	0.3990	0,2190
76	Binjai	0,35	0,32	0.2903	0.3020	0,2190
77	Padangsidempuan	0,31	0,35	0.3101	0.2750	0,2190
78	Gunungsitoli	0,32	0,32	0.3166	0.3030	0,2190
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara						

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas anggaran dimulai sejak proses penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran. Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan proses efisiensi anggaran selama proses penyusunan dokumen perencanaan tahun 2023:

No	Tahapan Proses	Pagu Anggaran	Ket	Efisiensi
1	Rancangan Awal RKPD	1.425.003.400.476,00	Perangkat Daerah mengusulkan anggaran tahun 2023	150.476.217.475,00
2	Rancangan RKPD	1.425.003.400.476,00	Bappelitbangda,	
3	Rancangan Akhir RKPD	1.274.527.183.001,00	BPKAD dan TPKAD	
4	Penetapan RKPD	1.274.527.183.001,00	memverifikasi usulan rancangan program dan kegiatan perangkat	

			daerah	
--	--	--	--------	--

Dari tabel tersebut, didapat bahwa terdapat efisiensi sebesar Rp. **150.476.217.475,00** saat proses penyusunan dokumen perencanaan tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jawaban dari Visi, Misi dan Tujuan Strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

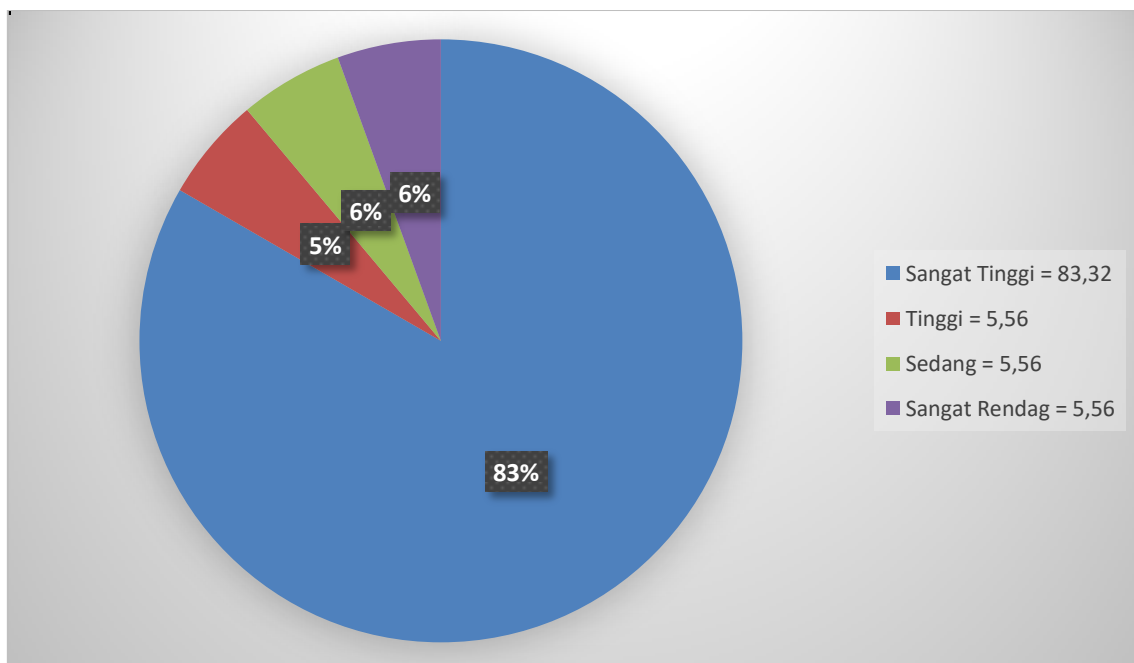
LKIP Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis

kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. 15 (enam belas) indikator sasaran atau sebanyak 83,32% masuk dalam kategori **Sangat tinggi**, 3 (tiga) dari 18 (delapan belas) indikator pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja,
2. 1 (satu) IKU sebanyak 5,56% masuk dalam kriteria **tinggi**,
3. 1 (satu) IKU atau 5,56% masuk dalam kriteria **sedang**,
4. 1 (satu) IKU atau 5,56% masuk dalam kriteria **Sangat rendah**,

Grafik 4.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah
Kabupaten Batu Bara Tahun 2023



Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian
----	---------	------------------	---------

1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	2 Indikator	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	1 Indikator	99,42
3	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1 Indikator	99,87
4	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	1 Indikator	101,3
5	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	1 Indikator	0
6	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	1 Indikator	100
7	Menurunnya Angka Kemiskinan	1 Indikator	99,11
8	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Indikator	74,06
9	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	2 Indikator	87,64
10	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	1 Indikator	96,41
11	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Indikator	92,03
12	Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja	1 Indikator	97,25
13	Meningkatnya Inovasi Daerah	1 Indikator	118,15
14	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Indikator	104,19
15	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1 Indikator	98,84
16	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Indikator	98,52%
17	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	1 Indikator	93,75%

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target, kami menyadari kelemahan dan ketidak sempurnaan kami. Segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk menjadi

barometer keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan lebih meningkatkan kinerja kita di masa yang akan datang.

Lima Puluh. 28 Maret 2024

